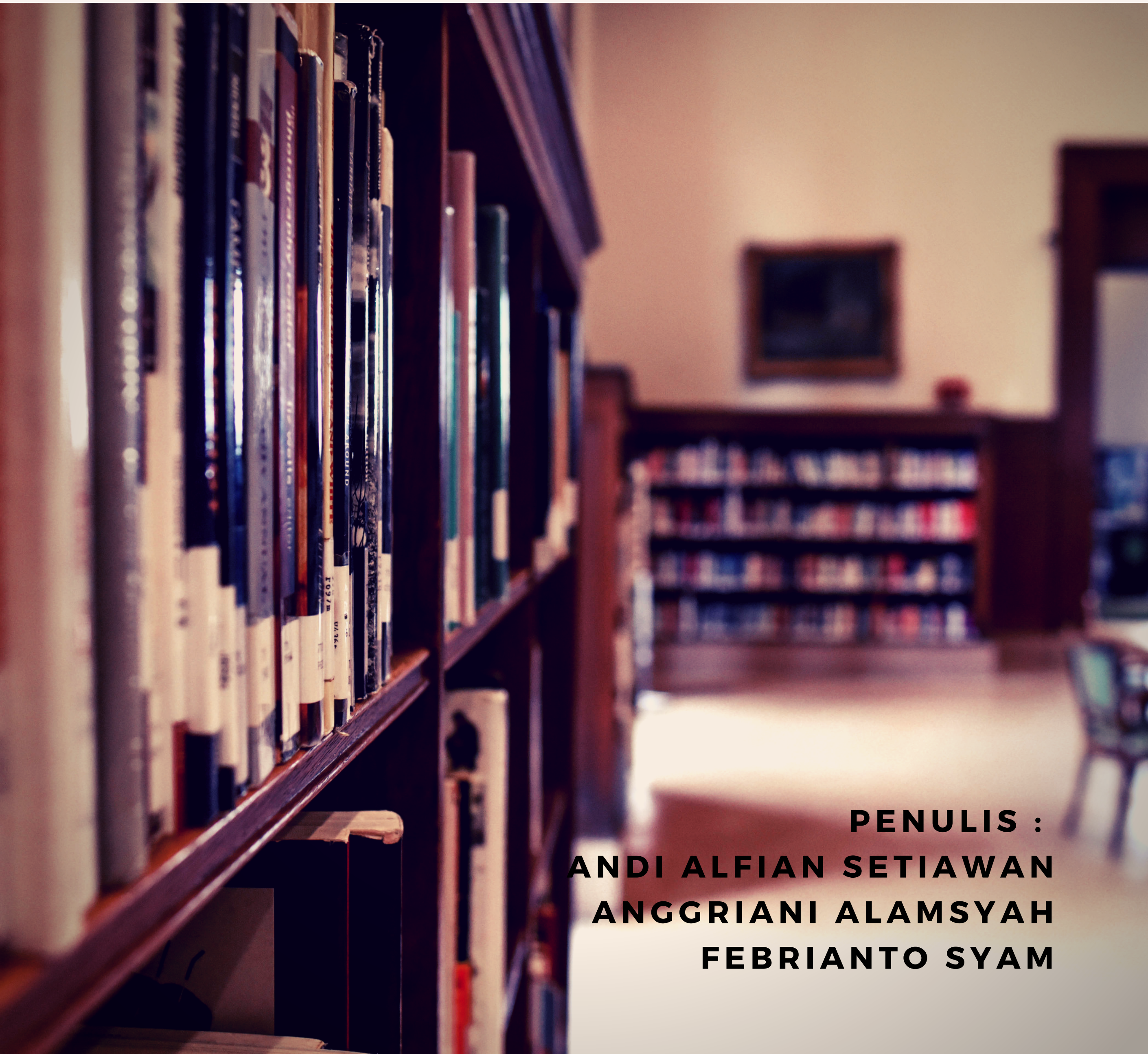


LABORATORIUM IPO

UIN ALAUDDIN

# HAK POLITIK KAUM DIFABEL DI KOTA MAKASSAR

Laboratorium Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar



**PENULIS :**  
**ANDI ALFIAN SETIAWAN**  
**ANGGRIANI ALAMSYAH**  
**FEBRIANTO SYAM**



# **HAK POLITIK KAUM DIFABEL DI KOTA MAKASSAR**

**Penulis:**

**Andi Alfian Setiawan**

**Anggriani Alamsyah**

**Febrianto Syam**



**Penerbit**

**Laboratorium Ilmu Politik**

## **UIN Alauddin Makassar**

### **HAK POLITIK KAUM DIFABEL DI KOTA MAKASSAR**

*Copyright @ Labortorium Ilmu Politik UIN Alauddin 2019*

Diterbitkan oleh  
Laboratorium Ilmu Politik  
UIN Alauddin Makassar

Penulis: Andi Alfian Setiawan  
Anggriani Alamsyah  
Febrianto Syam

Editor: Abu Bakar Mangun  
Reski Yanti Nurdin  
Riswandi

Desain Sampul: Riswandi

Hak cipta dilindungi Undang-Undang  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku  
ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

### **HAK POLITIK KAUM DIFABEL DI KOTA MAKASSAR**

Makassar: Laboratorium IPO UIN Alauddin Makassar, 2019

X + 108 hlm.; 15 x 23 cm

ISBN: 978-602-71164-9-8

## KATA PENGANTAR

Pemilu dan kaum difabel adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kaum difabel juga adalah warga Negara yang punya hak untuk memilih dan dipilih. Mereka mungkin memang tidak “sesempurna” manusia umumnya, tapi hak yang melekat pada mereka tidak melihat bentuk fisik yang melingkupi ‘jiwa’ mereka. Mereka punya hak untuk memilih dan dipilih, sebagaimana halnya manusia pada umumnya, karena mereka juga adalah warga Negara meskipun tidak semua orang bisa menerima hal tersebut.

Pemilu yang terjadi di Indonesia setiap lima tahun menyisakan banyak cerita bagi kaum difabel. Kaum difabel bukanlah semata obyek pemilu, tetapi mereka adalah subyek pemilu, yang harus dipenuhi kebutuhannya sebagaimana warga Negara pada umumnya. Kebutuhan khusus mereka bukanlah kekurangan, tetapi bagian dari warna-warni pemilu, yang bisa dijadikan pembeda dengan pemilu-pemilu lainnya. Ketika kampanye politik berlangsung, khususnya ketika debat, di sudut kiri atau kanan televisi akan ada orang yang memberikan isyarat dengan tangannya tentang apa yang sedang dikatakan pembicara, dan respon seperti apa yang di berikan oleh lawan bicaranya. Namun, nyatanya perhatian pada kepentingan kaum difabel tidak



berhenti ataupun dimulai pada saat kampanye, namun jauh sebelum itu dan jauh pula sesudahnya.

Buku ini berusaha meneropong peran Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) memaksimalkan fungsinya untuk memfasilitasi kaum difabel sebelum, selama dan sesudah pemilu berlangsung. Serta respon masyarakat terhadap fasilitas dan advokasi yang dilakukan oleh PPDI Provinsi Sulawesi Selatan menyangkut pemilihan umum. Peran PPDI mengadakan koordinasi, konsultasi dengan organisasi kecacatan dalam rangka peningkatan mutu dan pelayanan kesejahteraan penyandang cacat, memberikan masukan kepada Pemerintah dalam upaya peningkatan kebijaksanaan dan program dibidang kesejahteraan penyandang cacat, memperjuangkan pemenuhan hak-hak penyandang difabel dapat memperoleh kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Masyarakat sendiri cenderung untuk ‘menjauhi’ kaum difabel karena mereka dianggap merepotkan.

Apapun bentuknya, kaum difabel adalah kaum yang wajib untuk mendapat perhatian, tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga masyarakat. Masyarakat harus terus diberi edukasi akan pentingnya memberikan dukungan positif bagi kaum difabel dalam setiap sendi kehidupan. Mereka bukanlah beban, tetapi

mereka adalah rekan untuk bersama menuju kehidupan yang lebih baik.

Gowa, September 2019

**Penulis**



## PROLOG

Indonesia sebagai Negara hukum mengakui kunjungan tinggi hak asasi manusia sebagai hak dasar manusia bersifat kodrat. Oleh karena itu, perlindungan, dan penghormatan, serta penegakan terhadap hak asasi manusia sangat gencar disuarakan di Indonesia, guna terciptanya kesejahteraan, penghormatan terhadap kemanusiaan, keadilan dan kebahagiaan sebagai umat bernegara.

Hak Asasi Manusia (HAM) muncul dalam konteks perjuangan manusia sebagai hakikat hidup mereka, dalam menuju puncak keadaban hidup manusia yang lebih bermartabat. HAM adalah hak yang dimiliki seluruh manusia pada segala waktu dan tempat berdasarkan takdirnya sebagai manusia. Garis besar hak-hak terangkum dalam hak asasi manusia diantaranya adalah hak-hak asasi politik atau dikenal dengan *political right* atau hak politik.

Pemenuhan hak-hak politik adalah adanya kebebasan bagi setiap warga untuk menyatakan pendapat dan berkumpul. Seperti yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 28: “kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Setiap orang memiliki hak yang sama untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan, dimana hak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup>

HAK politik bagi penyandang cacat atau difabel di Indonesia dinilai masih belum terpenuhi dengan baik. Diantaranya terkait hak penyandang untuk memilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).”Hak untuk memilih bagi penyandang difabel memang sudah terlindungi oleh Undang-Undang, akan tetapi pada tahap pelaksanaan masih ada pengabaian hak,” ujar istri mantan Presiden Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah Wahid. Minimnya fasilitas menyebabkan hak memilih bagi penyandang difabel rentan manipulasi. Melihat hak untuk memilih yang juga melekat pada diri penyandang difabel, sangat jauh dari harapan. Selalu ada sejumlah syarat, seperti sehat jasmani dan rohani. Seolah-olah syarat ini menghalangi penyandang cacat untuk bisa memilih. Penyelenggara pemilu dan pilkada membuat kebijakan bersifat politik yang lebih memihak kepada penyandang difabel di Indonesia. Perlu ada kebijakan politik lebih agar penyandang

---

<sup>1</sup> Hanga Agung Bramantyo, “*Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Pilkada Sleman 2015*”, *Skripsi*, Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.



cacat lebih diperhatikan. Sehingga sarana dan fasilitas bagi penyandang difabel untuk menyalurkan hak politiknya bisa lebih memadai.

Persatuan Penyandang Cacat Indonesia (PPCI) yang kini telah berganti nama menjadi Persatuan Penyandang Difabel Indonesia, yang kemudian disingkat PPDI merupakan organisasi payung dan beranggotakan beragam organisasi sosial kecacatan yang ada di Indonesia yang didirikan pada tahun 1987 di Jakarta. PPDI yang berada di Jakarta adalah perpanjangan tangan dari PPDI Pusat yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan yang beribukota di Makassar. Visi lembaga ini adalah mewujudkan partisipasi penuh dan persamaan kesempatan penyandang difabel dalam seluruh aspek kehidupan. PPDI berfungsi sebagai lembaga koordinasi dan advokasi bagi anggota-anggotanya, sedangkan bagi pemerintah PPCI merupakan mitra dalam penyusunan berbagai kebijakan dan program berkaitan penyandang difabel. PPDI memiliki jaringan kerja hampir diseluruh provinsi di Indonesia dan merupakan anggota dari *Disabled People Internasional*. Sejak tahun 2005, PPDI bersama organisasi jaringan aktif lainnya, kemudian mendorong dan memberikan konsep naskah akademis bagi proses ratifikasi dikemudian hari.

Buku ini mengandung uraian tentang pemenuhan hak politik penyandang difabel, sebab pemenuhan hak politik ini tidak hanya serta merta pada tahapan pencoblosan, namun jauh dari itu adalah tahapan sosialisasi, tahapan masa kampanye sehingga masyarakat difabel memperoleh orientasi politik. Selain itu dengan kompleksnya masalah yang ada yang ingin dikaji oleh peneliti adalah motivasi pemilih difabel dalam menggunakan hak politiknya, sebab kompleksnya masalah yang dialami oleh kaum difabel akan menyita kemauan yang besar untuk menggunakan hak politik ditengah keterbatasan, terutama dalam menyangkut kemampuan fisik, psikis dan anggapan masyarakat luar terhadap kaum difabel. adapun poin-poin pentingnya antara lainnya;



## **DAFTAR ISI**

### **BAB I**

Kaum Difabel Dan Hak Politik	1
------------------------------	---

### **BAB II**

Hak Politik Kaum Difabel Dalam Tinjauan Ilmiah	21
1. Konsep Hak Asasi Manusia (HAM)	21
2. Rasional Choice	34
3. Kebijakan Publik	36
4. Partisipasi Politik	39

### **BAB III**

Profil Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI)	44
--	----

### **BAB IV**

Bentuk Perhatian PPDI Terhadap Hak Politik Kaum Difabel	66
---	----

### **BAB V**

Pemenuhan Hak Politik Kaum Difabel Di Kota Makassar	96
---	----

### **BAB VI**

Penutup	103
---------	-----

### **BAB VII**

Daftar Pustaka	106
----------------	-----

BABI

## ***KAUM DIFABEL DAN HAK POLITIK***

Setiap orang terlahir dengan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kekurangan setiap manusia baik secara fisik maupun non fisik yang dinilai tidak normal disebut dengan istilah penyandang cacat. Sehingga difabel atau kata yang memiliki definisi "*Different Abled People*" ini adalah sebutan bagi orang cacat. Kata ini sengaja dibuat oleh lembaga yang mengurus orang – orang cacat dengan tujuan untuk memperhalus kata – kata atau sebutan bagi seluruh penyandang cacat yang kemudian mulai ditetapkan pada masyarakat luas pada tahun 1999 untuk menggunakan kata ini sebagai pengganti dari kata cacat. (*sumber : [www.google/difabel.com](http://www.google/difabel.com)*). Ada beberapa definisi dari kata difabel ini. Berikut merupakan beberapa tanggapan dan pengertian tentang definisi difabel antara lain; *John C. Maxwell*, difabel adalah mempunyai kelainan fisik dan atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan suatu rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktifitas secara layak atau normal.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), difabel adalah suatu kekurangan yang menyebabkan nilai atau

mutunya kurang baik atau kurang sempurna / tidak sempurna akibat kecelakaan atau lainnya yang menyebabkan keterbatasan pada dirinya secara fisik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), difabel adalah suatu kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna / tidak sempurna akibat kecelakaan atau lainnya yang menyebabkan keterbatasan pada dirinya secara fisik. Menurut WHO, difabel adalah suatu kehilangan atau ketidaknormalan baik psikologis, fisiologis maupun kelainan struktur atau fungsi anatomis.

Para penyandang difabel dipandang sebelah mata bagi masyarakat luas, hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor beberapa diantaranya disebabkan oleh keterbatasan mereka untuk melakukan suatu aktivitas dan keterbatasan mereka terhadap kemampuan fisik mereka. Oleh karena itu dengan tujuan mensejajarkan keberadaan antar kaum difabel dan manusia pada umum maka dibuatlah bangunan yang memberikan suatu pelayanan bagi para kaum difabel. Untuk mengetahui jumlah perkembangan penyandang difabel dari tahun-tahun, butuh suatu pembahasan mengenai jumlah penderita cacat. Pada tahun **2011** tercatat jumlah penyandang cacat di D.I. Yogyakarta sebanyak **29.110**, yang terdiri dari

**15.667** pria dan **13.443** wanita. Ini merupakan jumlah total dari keseluruhan penyandang cacat karena untuk penyandang cacat ini pun juga merupakan jumlah dari gabungan jenis cacat fisik maupun cacat mental. Namun dari jumlah yang banyak ini tidak semua dapat ditampung karena muatan dari pusat-pusat rehabilitas yang terbatas, bukan hanya itu jumlah yang tidak dapat ini pun berkelanjutan di tahun ini. Belum ada suatu usaha pemecahan permasalahan yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini, oleh karena itu diharapkan adanya pusat-pusat rehabilitas yang baru bermunculan sehingga permasalahan ini dapat terpecahkan

Ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang menjadi cacat (difabel), berikut merupakan penyebab dari hal ini:

1. **Penyebab lahir atau bawaan dari lahir**, pada umumnya yang menyebabkan seorang anak bisa terlahir cacat adalah kurangnya nutrisi yang diterima oleh kandungan, namun yang paling banyak dijumpai adalah kandungan yang kekurangan asam folat yang menyebabkan kecacatan pada otak, sum-sum tulang belakang, atau keterbatasan fisik.



2. **Akibat menyalami kecelakaan**, hal ini adalah hal yang umum atau paling banyak dijumpai pada penyebab seseorang menjadi cacat, namun biasanya ada beberapa orang yang tidak hanya mendapat keterbatasan fisik namun juga berpengaruh terhadap mental, dikarenakan hal trauma.
3. **Akibat suatu kejadian yang menyebabkan trauma**, ada beberapa orang yang mengalami sesuatu hal yang menyebabkan besarnya rasa trauma atau menyebabkan stress yang berlebih yang pada akhirnya berkelanjutan pada gangguan sikis orang tersebut, sehingga orang tersebut mengalami gangguan mental.

Difabel dimata masyarakat saat ini masih dipandang sebelah mata sebagai pihak yang perlu dikasihani. Bagi keluarga yang mempunyai anggota keluarga difabel terkadang menjadikan mereka sebagai aib keluarga yang ditutupi keberadaannya. Difabel di Indonesia harus menghadapi adanya “budaya aib” tersebut, dalam budaya aib penampilan fisik yang terlihat selalu menjadi sorotan utama daripada sikap-sikap yang dimiliki dalam diri.

Keterbatasan difabel harus berhadapan dengan sistem kaku yang berlaku dimasyarakat, sistem pembagian kerja dan sistem interaksi. Perusahaan menolak adanya karyawan difabel karena keterbatasan yang dimilikinya akan mempengaruhi kinerjanya, dengan kata lain kinerja karyawan difabel lambat dan tidak sesuai target. Difabel menyebabkan kemiskinan melalui beberapa proses eksklusi yang terjadi

dalam kehidupan sehari-hari seperti partisipasi difabel yang cenderung sangat minim baik diarah sosial maupun politik. Sebagian besar difabel memiliki kecenderungan yang “eksklusif” ditengah-tengah kehidupan masyarakat dalam artian mengasingkan dirinya dalam proses interaksi masyarakat. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap perkembangan dirinya karena kecenderungan ini menjadikan difabel minim akses informasi dan komunikasi. Minimnya informasi dan komunikasi tentu berpengaruh kepada keadaan sosial dan ekonomi dari difabel sendiri, dimana mereka tidak bisa membuka jaringan sosial (*social networking*) yang sangat penting terutama untuk mengakses dunia pekerjaan.

Penyandang difabel saat ini, banyak mengalami kesulitan dalam segi mobilitas. Untuk mengenal lingkungan

dan berkomunikasi saja, bagi penyandang difabel, masih banyak memiliki kelainan pada penglihatan, hingga banyak dari mereka (penyandang) difabel yang sangat memerlukan sarana khusus, seperti tongkat, buku-buku Braille, kaca mata bantu dan lain sebagainya. Penyandang difabel yang memiliki kelainan lain, diantaranya seperti cacat kaki membutuhkan bantuan kruk dan kursi roda untuk dapat berjalan melakukan aktivitasnya dan masih banyak lagi.

Kebanyakan dari mereka (Penyandang difabel) sering dianggap tidak berguna di masyarakat, bahkan penyandang difabel sendiri sering beranggapan bahwa dirinya hanya merepotkan orang-orang disekitarnya. Individu yang mengalami kecacatan, apapun faktor- faktor penyebabnya, baik faktor dari dalam (bawaan/*congenital*) maupun faktor dari luar (lingkungan setelah individu lahir/kecacatan mendadak), mempunyai pandangan negatif terhadap kondisi cacatnya, dan menjadi subjek *stereotype prejudice* serta *limitation* baik dari masyarakat yang memandangnya maupun dirinya sendiri karena merasa tidak mampu (Lahey, 2004). Lebih parahnya lagi banyak reaksi yang timbul oleh penyandang difabel yang mengalami kecacatan secara mendadak (kecelakaan) akan menjadi kehilangan semangat hidup, tidak bisa menerima

kenyataan dan cenderung menganggap dunia ini tidak adil bagi penyandang difabel. Masyarakat memandang kecacatan (*disability*) sebagai penghalang (*handicap*) untuk seseorang melakukan sesuatu, bukan sebagai pemacu untuk lebih kecil (Nurkolis dalam Dermanto, 2007).

Tidak heran apabila dari mereka, para penyandang difabel menjadi sangat depresi dan mengakhiri hidupnya, akibat dari mengalami kelainan kecacatan secara mendadak. Perubahan drastis tersebut, seperti kecelakaan yang mengakibatkan kecacatan, terutama pada fisiknya, memberi tekanan psikologis yang sangat besar bagi individu yang mengalaminya. Hal ini dikarenakan pada awalnya ia memiliki fisik yang normal, mampu beraktivitas dengan baik, tidak ada hambatan fisik untuk melakukan sesuatu, bekerja, berolah raga, berlari, dan lain-lain tiba-tiba dihadapkan pada kondisi cacat yang membuat individu menjadi terbatas untuk melakukan aktivitas sehari-hari, mengurus diri sendiri, bekerja (Burns dalam Hutapea, 2010). Setelah mengalami perubahan fisik, penyandang difabel harus membiasakan diri dengan keadaan yang baru agar bisa beraktifitas seperti pada saat penyandang difabel belum mengalami kecacatan. Bukan hanya membiasakan diri dengan keadaan fisik, tapi juga

menata kembali mental mereka agar bisa menerima keadaan yang kini dialami dan lebih percaya diri.

Penyandang difabel yang kian depresi, sangatlah memerlukan dukungan secara psikis dari orang terdekat maupun masyarakat di sekitar. Adanya dukungan keluarga, saudara, dan teman-teman sebaya, tentunya membuat mereka lebih dapat menerima kondisi fisiknya secara lebih tabah, lebih siap menghadapi lingkungan bahkan mereka dapat lebih mempersiapkan cita-cita dari awal. Begitu juga, bagi individu yang mengalami kecacatan setelah lahir (apalagi setelah individu memasuki masa dewasa) ketika individu sudah membangun cita-cita dari awal, mempunyai tujuan hidup, hubungan positif dengan orang lain, bekerja dan lain-lain, maka individu akan mengalami tekanan psikologis yang berat karena setelah terjadi kecelakaan dan divonis cacat mereka seperti tidak memiliki tujuan hidup lagi, diskriminasi oleh lingkungan, alienasi, *helpless* perasaan rendah diri, *stereotype* negatif (seperti *helpless*, *dependent* dan merepotkan orang lain, orang yang malang dan perlu dikasihani), *worthless* (Radler dalam Hutapea, 2011). Dukungan dari orang-orang terdekat penyandang difabel sangatlah berarti bagi penyandang difabel, paling tidaknya sebagai semangat dan dorongan bagi



penyandang difabel untuk tetap menjalani kehidupannya sebagai makhluk hidup.

Memang tidak bisa dipungkiri, bahwa masyarakat non difabel. Masyarakat lebih mendiskriminasi penyandang difabel dalam segala hal, penyandang difabel dianggap berbeda dalam hal segalanya baik secara fisik maupun kedudukannya di masyarakat. Masyarakat tidak memikirkan bagaimana agar penyandang difabel bisa menjadi bagian dari masyarakat seutuhnya, mempunyai kehidupan seperti masyarakat non difabel pada umumnya tidak dipandang sebelah mata. Secara psikologis, penyandang difabel harus menanggung beban rasa rendah diri. Sedangkan secara fisik, penyandang difabel menerima perlakuan yang kurang wajar, misalnya hambatan dalam belajar, penyesuaian dalam kehidupan masyarakat, mencari pekerjaan, aksesibilitas.

### **Hak Politik**

Hak Asasi Manusia (HAM) muncul dalam konteks perjuangan manusia menuju puncak peradaban hidup manusia yang lebih bermartabat. HAM adalah hak yang dimiliki seluruh manusia pada segala waktu dan tempat

berdasarkan takdirnya sebagai manusia.<sup>2</sup> Indonesia sebagai Negara hukum mengakui kunjungan tinggi hak asasi manusia sebagai hak dasar manusia bersifat kodrat.<sup>3</sup> Menurut ajaran agama Islam mengenai hak asasi manusia (HAM) merupakan persoalan yang fundamental, karena kelahiran Islam sebagai agama beranjak pada realitas kemanusiaan yang sesuai dengan fitrahnya, dan kemudian pada wujud ideal pelaksanaan kita dapat saksikan melalui kehidupan Nabi Muhammad SAW, sebagai *prime mover* (pendorong utama) dan *Uswatun khasanah* (teladan yang baik) untuk mengatasi umat manusia dari berbagai kenestapaan dan ketakberdayaan.<sup>4</sup> Pengertian pemilihan umum yang selanjutnya disingkat pemilu menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak politik bagi penyandang cacat atau difabel di Indonesia dinilai

---

<sup>2</sup> Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi Sosial, dan Budaya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 5.

<sup>3</sup> Khoirul Anam, "*Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan untuk Mahasiswa*", (Yogyakarta: Inti Media, 2011), h. 194.

<sup>4</sup> Moch. Basofi Soedirman, "*HAM dan Pluralisme Agama*" (Surabaya: Pusat Kajian Strategi Dan Kebijakan), h. 151.

masih belum terpenuhi dengan baik. Diantaranya terkait hak penyandang untuk memilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).” Hak untuk memilih bagi penyandang difabel memang sudah terlindungi oleh Undang- Undang (UU), tapi pada tahap pelaksanaan masih ada pengabaian hak,” ujar istri mantan Presiden Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah Wahid. Minimnya fasilitas menyebabkan hak memilih bagi penyandang difabel rentan manipulasi.

Lahirnya Hak politik, tentunya diatur dalam Undang- Undang Dasar sebagai *constitutional right* yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang salah satu elemen dasarnya adalah pemenuhan, pengakuan dan penjaminan akan hak-hak dasar warga negara. Dari berbagai literatur hukum tata negara maupun ilmu politik kajian tentang ruang lingkup paham konstitusi (konstitusionalisme) terdiri dari: (a) anatomi kekuasaan (kekuasaan politik) tunduk pada hukum, (b) jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, (c) peradilan yang bebas dan mandiri, dan (d) pertanggungjawaban kepada rakyat (akuntabilitas publik) sebagai sendi utama dari asas kedaulatan rakyat.

Sri Soemantri menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar sebagai Konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisi: (1) Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau, (2) Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa, (3) Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak mewujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang dan (4) Suatu keinginan, dengan nama perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.

Fenomena tersebut menjadikan konstitusi sebagai hukum yang tertinggi (*supremacy of law*) yang harus ditaati oleh rakyat maupun oleh alat-alat kelengkapan negara, siapakah yang akan menjamin bahwa ketentuan konstitusi atau Undang-Undang Dasar benar-benar diselenggarakan menurut jiwa dan kata-kata dari naskah, baik oleh badan eksekutif maupun badan pemerintah lainnya. TAP MPR-RI No.XVII/MPR/1998 tentang HAM, menyatakan Pembukaan UUD Tahun 1945 telah mengamanatkan pengakuan, penghormatan, dan kehendak bagi pelaksanaan HAM dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat internasional patut menghormati hak asasi

manusia yang termaktub dalam *Universal Declaration of Human Rights* serta instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia.

HAM dan demokrasi memiliki kaitan yang sangat erat, demokrasi memberikan pengakuan lahirnya keikutsertaan publik secara luas dalam pemerintahan, peran serta publik mencerminkan adanya pengakuan kedaulatan. Aktualisasi peran publik dalam ranah pemerintahan memungkinkan untuk terciptanya keberdayaan publik. Perlindungan dan pemenuhan HAM melalui rezim yang demokratik berpotensi besar mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sejak lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bangsa ini telah menjunjung tinggi HAM. Sikap tersebut tampak dari Pancasila dan UUD Tahun 1945, yang memuat beberapa ketentuan-ketentuan tentang penghormatan HAM warga negara. Sehingga pada praktek penyelenggaraan negara, perlindungan atau penjaminan terhadap HAM dan hak-hak warga negara (*citizen's rights*) atau hak-hak konstitusional warga negara (*the citizen's constitutional rights*) dapat terlaksana. Hak memberikan suara atau memilih (*right to vote*) merupakan hak dasar (*basic right*) setiap individu



atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh Negara.

Hak politik warga negara mencakup hak untuk memilih dan dipilih, penjaminan hak dipilih secara tersurat dalam UUD 1945 mulai Pasal 27 ayat (1) dan (2) Pasal 28, Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3). Sementara hak memilih juga diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C ayat (1) UUD 1945. Perumusan pada pasal-pasal tersebut sangat jelas bahwa tidak dibenarkan adanya diskriminasi mengenai ras, kekayaan, agama dan keturunan.

Setiap warga negara mempunyai hak-hak yang sama dan implementasinya hak dan kewajiban pun harus bersama-sama. Konkritisasi dari ketentuan-ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan dibawahnya, sesuai ketentuan yang ada dalam Undang-Undang tentang peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang tentang HAM yang secara nyata memberikan pengakuan terhadap hak-hak warga negara yaitu: (a) Hak untuk hidup, (b) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, (c) Hak mengembangkan diri, (d) Hak memperoleh keadilan, (e) Hak atas kebebasan pribadi, (f) Hak

atas rasa aman; (g) Hak atas kesejahteraan, (h) Hak turut serta dalam pemerintahan, (i) Hak wanita dan (j) Hak anak.

Pada point secara nyata negara memberikan pengakuan kepada setiap warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan baik dalam hal hak memilih dan dipilih. Undang-Undang HAM khusus Pasal 43: (1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. (3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Menurut Ramdlon Naning, HAM dapat dibedakan dalam:

(1). Hak-hak asasi pribadi (*personal right*), (2) hak-hak asasi ekonomi (*property rights*), (3) hak-hak asasi politik (*political rights*), (4) hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (*right of legal equality*), (5)

hak-hak asasi sosial dan kebudayaan (*social and culture rights*) dan (6) hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama di muka hukum dalam tata cara peradilan dan perlindungan (*procedural rights*). Pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) menyebutkan bahwa negara Indonesia mengakui dan melindungi hak setiap warga negara untuk mengambil bagian dalam pelaksanaan urusan-urusan publik, hak memilih dan dipilih, serta hak atas akses terhadap pelayanan publik.

Pada tanggal 28 Oktober 2005, Indonesia meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR) atau Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dengan disahkannya Undang-Undang tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Kovenan ini mengukuhkan pokok-pokok hak asasi manusia di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat hukum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang terkait, Kovenan tersebut terdiri dari pembukaan dan Pasal-Pasal yang mencakup 6 bab dan 53

Pasal ICCPR pada dasarnya memuat ketentuan mengenai pembatasan penggunaan kewenangan oleh aparat represif negara, khususnya aparat represif negara yang menjadi Negara-Negara Pihak dalam ICCPR, Makanya hak-hak yang terhimpun didalamnya juga sering disebut sebagai hak-hak negatif (*negative rights*). Artinya, hak-hak dan kebebasan yang dijamin didalamnya akan dapat terpenuhi apabila peran negara terbatas atau terlihat minus. Tetapi apabila negara berperan intervensionis, tak bisa dielakkan hak-hak dan kebebasan yang diatur di dalamnya akan dilanggar oleh negara. Inilah yang membedakan dengan model legislasi Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHEsb) yang justru menuntut peran maksimal negara. Negara justru melanggar hak-hak yang dijamin didalamnya apabila negara tidak berperan secara aktif atau menunjukkan peran yang minus. Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHEsb) karena itu sering disebut hak-hak positif (*positive rights*)

Ifdhal Kasim dalam kata pengantar buku Hak Sipil dan Politik Esai-Esai Pilihan, membuat dua klasifikasi terhadap hak-hak dan kebebasan dasar yang tercantum dalam ICCPR. Klasifikasi yang pertama, adalah hak-hak dalam jenis

*non-derogable rights*, yaitu hak-hak yang bersifat absolut dan tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh Negara-Negara Pihak, walaupun dalam keadaan darurat sekalipun. Hak-hak yang termasuk dalam jenis ini adalah:

(1) Hak atas hidup (*rights to life*), (2) hak bebas dari penyiksaan (*rights to be free from torture*), (3) hak bebas dari perbudakan (*rights to be free from slavery*), (4) hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (hutang), (5) hak bebas dari pembedaan yang berlaku surut, (6) hak sebagai subyek hukum dan (7) hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama. Negara-negara pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak dalam jenis ini seringkali akan mendapat kecaman sebagai negara, yang telah melakukan pelanggaran serius hak asasi manusia (*gross violation of human rights*).

Kelompok kedua adalah hak-hak dalam jenis *derogable*, yakni hak-hak yang boleh dikurangi atau dibatasi dalam pemenuhannya oleh Negara-Negara Pihak. Hak dan kebebasan yang tergantung dalam jenis ini adalah:

(i) Hak atas kebebasan berkumpul secara damai, (ii) hak atas kebebasan berserikat, termasuk membentuk dan



menjadi anggota serikat buruh, (iii) hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi, termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dari segala gagasan tanpa memperhatikan batas (baik melalui lisan maupun tulisan). Negara-negara pihak dalam ICCPR diperbolehkan mengurangi atau mengadakan penyimpangan atas kewajiban dalam memenuhi hak-hak tersebut. Tetapi penyimpangan itu hanya dapat dilakukan apabila sebanding dengan ancaman yang dihadapi dan tidak bersifat diskriminatif, yaitu demi; (i) menjaga keamanan nasional, atau ketertiban umum atau kesehatan atau moralitas umum dan (ii) menghormati hak/ kebebasan orang lain. *Rosalyn Higgins* menyebut ketentuan ini sebagai ketentuan "*clawback*", yang memberikan suatu keleluasaan kepada negara yang dapat disalahgunakan oleh negara. Untuk menghindari hal ini ICCPR menggariskan bahwa hak-hak tersebut tidak boleh dibatasi melebihi dari yang ditetapkan oleh kovenan ini. Selain diharuskan menyampaikan alasan-alasan mengapa pembatasan tersebut dilakukan kepada semua Negara-Negara Pihak ICCPR

BAB II

## ***KAUM DIFABEL DALAM TINJAUAN ILMIAH***

### **1. Konsep Hak Asasi Manusia (HAM)**

Secara etimologi, hak asasi manusia terbentuk dari tiga suku kata, yakni hak, asasi dan manusia. Yahiqqu ‘alaika an ta’ala kadza, itu artinya kamu wajib melakukan seperti itu. Berdasarkan pengertian tersebut, haqq adalah kewenangan atau kebebasan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.<sup>5</sup> Dalam bahasa Indonesia, HAM dapat diartikan sebagai hak-hak mendasar pada diri manusia. Istilah ini, sekalipun secara literal berbeda penyebutannya, namun memiliki pemakna yang relatif sama. HAM merupakan puncak konseptualisasi manusia tentang eksistensi dirinya sebagai manusia.<sup>6</sup>

Hak Asasi Manusia (HAM) muncul dalam konteks perjuangan manusia dalam menuju puncak peradaban hidup manusia yang lebih bermartabat. HAM adalah hak yang dimiliki seluruh manusia pada segala waktu dan tempat berdasarkan takdirnya sebagai manusia. Hak tidak hanya berkembang seiring dengan perkembangan wajah serta tuntutan dari diri manusia itu sendiri yang cenderung di

---

<sup>5</sup> Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi Sosial, dan Budaya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 17.

<sup>6</sup> Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi Sosial, dan Budaya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 19.

pengaruhi oleh lokalitas lingkungan diri dan masyarakatnya, akan tetapi HAM telah menjadi objek kajian ilmiah yang menarik bahkan menjadi spesialisasi tersendiri. HAM sesungguhnya bagian dari kemanusiaan yang paling intrinsik.<sup>7</sup> Garis besar hak-hak terangkum dalam hak asasi manusia diantaranya adalah hak-hak asasi politik atau dikenal dengan *political right* atau hak politik.

Indonesia sebagai Negara hukum mengakui junjungan tinggi dari sebuah hak asasi manusia sebagai hak dasar manusia yang bersifat kodrat. Oleh karena itu, perlindungan, penghormatan dan penegakan terhadap hak asasi manusia sangat gencar disuarakan di Indonesia demi terciptanya kesejahteraan, penghormatan terhadap kemanusiaan, kesetaraan, penghapusan diskriminasi, perlakuan adil serta kebahagiaan sebagai ummat beragama dan bernegara.

Pemenuhan hak-hak politik adalah adanya kebebasan bagi setiap warga Negara, untuk dapat menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul. Seperti yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 28, “kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya

---

<sup>7</sup> Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi Sosial, dan Budaya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 5.

ditetapkan dengan undang-undang”. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan, dimana hak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>8</sup>

Menurut ajaran agama Islam mengenai hak asasi manusia (HAM) merupakan persoalan yang fundamental, karena kelahiran Islam sebagai agama yang beranjak pada realitas kemanusiaan yang sesuai dengan fitrahnya dan kemudian pada wujud ideal dalam pelaksanaan dapat disaksikan, seperti melalui kehidupan Nabi Muhammad SAW, sebagai *prime mover* (pendorong utama) dan *Uswatun khasanah* (teladan yang baik) untuk mengatasi umat manusia dari berbagai kenestapaan dan ketakberdayaan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Hangga Agung Bramantyo, “Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2015”, *Skripsi*, Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

<sup>9</sup> Moch. Basofi Soedirman, “HAM dan Pluralisme Agama” (Surabaya: Pusat Kajian Strategi Dan Kebijakan), h. 151.

Pandangan agama islam terhadap hak politik difabel sesuai tuntutan yang telah ditentukan dalam Al-Quran sesuai firman Allah swt dalam Q.S An-Nisa 3:49 yang berbunyi :

وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا

٨٦

Terjemahnya :

*Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah memperbitungkan segala sesuatu.<sup>10</sup>*

Penjelasan ayat diatas bahwasanya saling menghargailah kepada sesama masyarakat, jangan membedakan sesamama masyarakat baik secara fisik ataupun mental semua masyarakat sama. Ketika melihat persamaan hak, setiap masyarakat memiliki hak yang sama, yang difabel dan non difabel semuanya sama. Saling menghargailah sesama manusia karna manusia dimata Allah swt sama dan memiliki kesamaan hak yang sama dalam dunia.

---

<sup>10</sup> Departemen kementerian agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2016), h.91.

Persamaan hak merupakan tujuan utama diutusnya para rasul dan diturunkannya syariat dan juga hukum sebagai penegak dari asas kehidupan manusia. Persamaan hak ini kemudian menjadi ikatan antara penghubung dari prinsip-prinsip yang menyeluruh serta kaidah-kaidah umum yang dapat menjadi satu dasar bagi sistem kehidupan yang dapat memelihara eksistensi dari komunitas manusia. Berlaku adil adalah sistem Allah dan syariatnya yang merupakan sistem segala sesuatu.<sup>11</sup>

Seperti pada Hadits Rasulullah SAW :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبيدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فِكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»<sup>12</sup>

Artinya:

*Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari 'Ubaidulloh berkata, telah menceritakan kepadaku Nafi' dari 'Abdullah*

---

<sup>11</sup> Farid Abdul Khaliq, “*Fiikih Piliitik Islam*” (Jakarta: AMZAH), h. 221.

<sup>12</sup> Muhammad bin Isma'il Abu 'Abdillah al-Bukhari al-Ju'fi, *Sahih al-Bukhari*, Juz III, h. 150.

*radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Amir (kepala Negara), dia adalah pemimpin manusia secara umum, maka dia akan diminta pertanggung jawaban atas mereka. Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas mereka. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam rumah tangga suaminya dan terhadap anak-anaknya dan dia akan diminta pertanggung jawaban atas mereka. Seorang hamba sahaya adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya dia akan diminta pertanggung jawaban atasnya. Ketahuilah bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggung jawaban atas siapa yang dipimpinnya ".*

Setiap orang atau laki-laki/perempuan memiliki hak melakukan hal yang di inginkannya, baik berupa dari segi kepemimpinan atau dari hal lainnya. Dalam hadist diatas baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak atas mereka masing-masing. Dari segi apapun setiap orang memiliki haknya sendiri baik dari segi apapun. Berkaitan dengan HAM tersebut, tentunya salah-satu yang berkaitan dengan prinsip dari kebebasan HAM, yakni adanya pemilihan umum yang selanjutnya disingkat sebagai pemilu. Pemilu ini menurut



Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga pemilihan umum merupakan arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik dipemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga Negara yang memenuhi syarat.<sup>13</sup>

Pada era modern ini pemilihan umum memiliki posisi yang sangat penting karena, erat kaitannya dengan pemilihan umum dalam menempati posisi yang penting bagi keberlangsungan hidup demokrasi perwakilan serta pemilihan umum yang menjadi indikator negara demokrasi. Pemilihan umum dianggap sebagai lambang, sekaligus tolak ukur, dari praktik demokrasi. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan sangat akurat, partisipasi serta aspirasi dari masyarakat sangatlah kental dengan nuansa berbudaya.

---

<sup>13</sup> Hangga Agung Bramantyo, “Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2015”, *Skripsi*, Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Pemilihan umum tidak merupakan satu-satunya tolak ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan seperti partisipasi dalam kegiatan partai, *lobbying* dan lain sebagainya.<sup>14</sup>

Pemilihan umum merupakan salah satu pilar dasar dari sistem negara demokrasi. Pemilihan umum dilaksanakan di Indonesia secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemilihan umum dilaksanakan secara nasional, baik di provinsi dan kabupaten/kota di seluruh wilayah Negara Indonesia dan diharapkan seluruh masyarakat Indonesia dapat berpartisipasi aktif di dalamnya, termasuk partisipasi kaum difabel.

Ketentuan tentang partisipasi secara aktif dalam kehidupan berpolitik terkandung dalam pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, pasal 25 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, pasal 28D ayat (3), pasal 28H ayat 2 dan pasal 28I ayat (2) UUD 1945

---

<sup>14</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Prima Grafika, 2015), h. 461.

setelah amandemen dan pasal 43 ayat (1) dan (2) UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Inti pasal-pasal tersebut antara lain setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, baik kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan berupa dipilih dan memilih dalam pemilu maupun aksesibilitas untuk mendapatkan kesempatan tersebut tanpa diskriminasi. Landasan hukum tersebut berlaku pula bagi penyandang difabel dan diperkuat dengan UU No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang difabel.<sup>15</sup>

Peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah banyak yang dibuat untuk melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang difabel. Tetapi pada kenyataannya, hak-hak penyandang difabel yang telah dilindungi dalam peraturan perundang-undangan tersebut masih banyak yang belum dapat direalisasikan. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat menyebutkan bahwa setiap penyandang cacat mempunyai 6 (enam) hal penting yang berhak untuk mereka peroleh, meliputi : *pertama*, pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis dan jenjang

---

<sup>15</sup> Ayi Haryani dan Enung Huripah, “Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Netra Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Di Panti Sosial Bina Netra “WYATA GUNA” Bandung”, Jurnal Agregasi, Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom, Vol. 2, No. 1, Tahun 2014, h. 90.

pendidikan; *kedua*, pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuannya; *ketiga*, perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya; *keempat*, aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya; *kelima*, rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; *keenam*, serta hak yang sama untuk menumbuhkan bakat, kemampuan dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang difabel dalam lingkungan masyarakat. Hak-hak penyandang difabel masih banyak yang belum dipenuhi apabila diamati berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tersebut.<sup>16</sup>

HAK politik bagi penyandang cacat atau difabel di Indonesia dinilai masih belum terpenuhi dengan baik. Diantaranya terkait hak penyandang untuk memilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).” Hak untuk memilih bagi penyandang difabel memang sudah terlindungi oleh Undang- Undang (UU), tapi pada tahap pelaksanaan masih ada pengabaian hak,” ujar istri mantan Presiden Abdurrahman Wahid, Sinta

---

<sup>16</sup> Maria Desti Rita,” *Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilihan Umum Kepala Daerah Kepada Penyandang Disabilitas Di Kota Bandar Lampung*”, (Skripsi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, 2016), h. 6.

Nuriyah Wahid. Minimnya fasilitas menyebabkan hak memilih bagi penyandang difabel rentan manipulasi. Melihat hak untuk memilih yang juga melekat pada diri penyandang difabel, sangat jauh dari harapan. Selalu ada sejumlah syarat, seperti sehat jasmani dan rohani. Seolah-olah syarat ini menghalangi penyandang cacat untuk bisa memilih. Penyelenggara pemilu dan pilkada membuat kebijakan bersifat politik yang lebih memihak kepada penyandang difabel di Indonesia. Perlu ada kebijakan politik lebih agar penyandang cacat lebih diperhatikan. Sehingga sarana dan fasilitas bagi penyandang difabel untuk menyalurkan hak politiknya bisa lebih memadai.<sup>17</sup>

Kebebasan dari hak politik dan sipil mencakup hak-hak yang memungkinkan warga negara ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik. Hak politik mencakup hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan memberikan suara dalam pemilihan umum yang berkala dengan hak suara yang universal dan setara.<sup>18</sup>

Hak-hak politik berkembang sejalan dengan tumbuhnya sistem negara bangsa yang dilembagakan ke dalam sistem parlementer. Hak-hak politik yang berkaitan

---

<sup>17</sup> Aria Triyudha, "*Sinta Wahid: Hak Politik Penyandang Cacat Masih Terabaikan*", Jurnal Jakarta 9 Juli 2012.

<sup>18</sup> Jurnal analisis sosial, Volume 7.h. 11, (2002).

dengan proses pengambilan keputusan yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi dengan memberikan hak pilih pada saat pemilihan berlangsung.<sup>19</sup>

Hak pilih universal dan kesetaraan politik berarti, semua pemilih memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam proses pemilu, membangun referensi politik melalui akses tidak terbatas, keberagam sumber media independen, menyalurkan referensi melalui pemungutan suara dan penghitungan suara secara sama.<sup>20</sup> Hak memilih merupakan dasar keikutsertaan dalam pemilu. Setiap manipulasi atas hak pilih ini ada alasan serta akibat yang khusus. Oleh karena itu seringkali ada upaya untuk mengubah mayoritas yang ada dengan bantuan penggantian hak pilih ini.

Yang pertama-tama perlu tersedia adalah sebuah ketentuan yang berlaku, yang mengatur undang-undang pemilu secara umum. Hal berarti bahwa setiap warga yang memenuhi ketentuan berhak untuk memberikan suaranya, terlepas dari jenis kelamin, suku, bahasa, pemasukan atau kepemilikan, profesi, golongan atau status, pendidikan, kepercayaan atau keyakinan politik yang dimilikinya.

---

<sup>19</sup> Fuad Fachruddin, *Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nadhlatul Ulama*, (Pustaka Alvabet 2006), h. 35

<sup>20</sup> Peter Schroder, *Strategi Politik*, (Jakarta: Friedrich Nauman Stiftung, 2004), h. 319.

Ketentuan/persyaratan yang dikaksud diatas adalah yang menyangkut usia tertentu, kewarganegaraan, tempat tinggal, kesehatan, mental dan kemampuan untuk melakukan tindakan hukumnamun hal inilah yang sering dianipulasi.<sup>21</sup>

Diskusi yang terus dilakukan adalah yang menyangkut permasalahan buta huruf atau *analphabeticisme*. Keraguan bahwa pemilih yang buta huruf akan mengalami kesulitan untuk memahami lembaran kertas suara yang rumit bukannya tidak beralasan. Tugas negara adalah untuk menyiapkan suara sedemikian rupa, misalnya dengan bantuan gambar atau symbol, sehingga orang yang buta huruf sekalipun dapat mengenali partai/kandidat yang diajukan. Undang-undang pemilu hendaknya juga mempertimbangkan kemampuan para pemilih.<sup>22</sup> Di sisi lain sistem, pemilu dibeberapa negara memberikan hak pilih bagi warga pengungsi, sementara di negara lainnya hal ini tidak dimungkinkan.

Konsep ini, kebanyakan di gunakan dalam melihat pemerataan HAM di segala golongan masyarakat, khususnya di kalangan difabel dalam kehidupan sosial politik, sebab individu tidak terlepas dari ruang interaksi yang

---

<sup>21</sup> Peter Schroder, *Strategi Politik*, (Jakarta: Friedrich Nauman Stiftung, 2004), h. 320.

<sup>22</sup>Peter Schroder, *Strategi Politik*, 2004, h. 320.

memungkinkan terjadinya diskriminasi. Oleh karena itu konsep ini hadir untuk menganalisis permasalahan tersebut.

## 2. Rasional Choice

Rasional choice atau pendekatan pilihan rasional lahir dalam dunia yang bebas dari peperangan besar selama hamper empat dekade, dimana seluruh dunia berlomba-lomba membangun ekonomi negaranya. Berbagai negara baru menyusun rencana-rencana pembangunan, sedangkan beberapa negara kaya turut membantu melalui bermacam-macam organisasi internasional atau secara bilateral.<sup>23</sup>

Inti dari politik menurut penganut rasional choice adalah individu sebagai aktor penting dalam dunia politik. Sebagai makhluk rasional ia selalu mempunyai tujuan-tujuan yang mencerminkan apa yang dianggapnya kepentingan diri sendiri. Ia melakukan hal itu dalam situasi terbatasnya sumber daya (*resource restraint*), dan karena itu ia perlu membuat pilihan.<sup>24</sup>

Pelaku *Rational Action* ini, terutama politisi, birokrat, pemilih (berbagai acara pemilihan) dan aktor ekonomi pada dasarnya egois dan segala tindakannya berdasarkan

---

<sup>23</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Prima Grafika, 2015), h. 92.

<sup>24</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, h. 93.



kecenderungan ini. Mereka selalu mencari cara yang efisien untuk mencapai tujuannya. Optimalisasi kepentingan dan efisiensi merupakan inti dari *rasional choice*.

Berbagai penganut *rasional choice* mempunyai penjelasan yang berbeda-beda, substansi dasar dari doktrin ini telah diluruskan oleh James B. Rule, sebagai berikut (terjemahannya dipersingkat):

1. Tindakan manusia (*human action*) pada dasarnya adalah “instrument” (dalam arti: alat bantu), agar perilaku manusia dapat dijelaskan sebagai usaha untuk mencapai suatu tujuan yang sedikit banyak jarak jauh. Untuk manusia, alat untuk kesatuan yang lebih besar, tujuan atau nilai tersusun secara hierarkis yang mencerminkan preferensinya mengenai apa yang diinginkan atau yang diperlukan. Hierarchy preferensi ini relatif stabil.
2. Para aktor merumuskan perilaku melalui perhitungan rasional mengenai aksi mana yang akan memaksimalkan keuntungannya. Informasi relevan yang dimiliki oleh aktor sangat memengaruhi hasil dari perhitungannya.
3. Proses-proses sosial berskala besar termasuk hal-hal seperti *ratings*, institusi dan praktik-praktik

merupakan hasil dari kalkulasi seperti itu. Mungkin akibat dari pilihan kedua, pilihan ketiga atau pilihan N perlu dilacak.<sup>25</sup>

Dalam penelitian ini, Rasional Choice digunakan untuk menelusuri tindakan kaum difabel dalam kehidupan berpolitik yang juga tidak terlepas dari proses menentukan pilihan politik, tentunya sangat menarik untuk diteliti guna guna memperkaya penelitian ini.

### 3. Kebijakan Publik

Kebijakan atau *policy* berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang-orang banyak yang menjadi sasaran kebijakan (kelompok target). Kebijakan merupakan sebuah alat atau instrument untuk mengatur penduduk dari atas kebawah. Menurut Heinz Eulau dan Kenneth Prewith, kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang mematuhi keputusan-keputusan. Dengan cara memberi *reward* dan *sanctions*. Secara sentralistik, kebijakan adalah instrumen teknis, rasional dan *action-oriented* untuk

---

<sup>25</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, h. 94.

menyelesaikan masalah. Kebijakan adalah cetak biru bagi tindakan yang mengarah dan mempengaruhi perilaku orang banyak yang terkena dampak keputusan tersebut. Kebijakan sengaja disusun dan dirancang untuk membuat perilaku orang banyak yang dituju (kelompok target) menjadi terpola sesuai dengan bunyi dan rumusan kebijakan tersebut.<sup>26</sup>

Kebijakan publik menurut J. A. Anderson (1979), dalam subarsono, (2006) sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Maka dalam pandangan David Easton bahwa ketika pemerintah membuat kebijakan public, ketika itu pula pemerintah mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai didalamnya. Kebijakan public pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah negara dan pembangunan bangsa.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Amri Marzali, *Antropologi dan Kebijakan Publik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 20.

<sup>27</sup> Muhammad Ramli, *"Kearifan Lokal Dalam Implementasi Kebijakan Publik"*, (Makassar: Alauddin University Press), h. 91-93.

Mengacu pada Hogwood dan Gunn, Bridgman dan Davis (2004) menyatakan bahwa kebijakan publik sedikitnya mencakup hal-hal seperti: (1) Bidang kegiatan sebagai ekspresi dari tujuan umum atau pernyataan-pernyataan yang ingin dicapai. (2) Proposal tertentu yang mencerminkan keputusan-keputusan pemerintah yang telah dipilih. (3) Kewenangan formal seperti undang-undang atau peraturan pemerintah. (4) Program, yakni seperangkat kegiatan yang mencakup rencana penggunaan sumberdaya lembaga dan strategi pencapaian tujuan. (5) Keluaran (output), yaitu apa yang nyata telah disediakan oleh pemerintah, sebagai produk dari kegiatan tertentu.<sup>28</sup>

Teori kebijakan publik digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah terhadap kaum difabel dari segi perhatian pemerintah mengenai hak-hak politik kaum difabel, sebab kebijakan pemerintah terhadap kaum difabel menjadi dasar realisasi hak-hak kaum difabel dalam kehidupan sosial dan politik.

---

<sup>28</sup> A. Syamsul Alam, “Analisis Kebijakan Publik Kebijakan Sosial Di Perkotaan Sebagai Sebuah Kajian Implementatif”, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 3, 3 Juni 2012, h. 81.

#### 4. Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan aksi langsung, dan sebagainya. Menurut Herbert McClosky, partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.<sup>29</sup>

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Partisipasi merupakan taraf partisipasi politik warga masyarakat dalam kegiatan-kegiatan politik baik yang bersifat aktif maupun pasif dan bersifat langsung maupun yang tidak langsung guna mempengaruhi kebijakan

---

<sup>29</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Prima Grafika, 2015), h. 367.

pemerintah. Menurut Myron Weiner seperti dikutip oleh Mas'ood, paling tidak terdapat lima hal yang menyebabkan timbulnya gerakan kearah partisipasi lebih luas dalam proses politik.

1) Modernitas

Ketika penduduk kota baru (yaitu buruh dan pedagang, kaum professional) melakukan komersial pertanian, industrialisasi, urbanisasi yang mengikat, penyebab kepandaian baca tulis, perbaikan pendidikan dan pengembangan media massa, mereka sendiri, makin banyak menuntut untuk ikutan dalam kekuasaan politik

2) Perubahan-perubahan structural kelas sosial

Begitu terbentuk suatu kelas pekerja baru dan kelas menengah yang meluas dan berubah selama proses industrialisasi dan modernisas, masalah tentang siapa yang berhak berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pola partisipasi politik.

3) Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern

Kaum intelektual (sarjana, filosof, pengarang, wartawan) sering mengemukakan ide-ide seperti egaliterisme dan nasionalisme kepada masyarakat untuk membangkitkan tuntunan akan partisipasi massa yang luas dalam pembuatan keputusan politik. Sistem-sistem transportasi dan komunikasi modern memudahkan dan mempercepat penyebaran ide-ide baru.

- 4) Konflik di antara kelompok-kelompok pemimpin politik

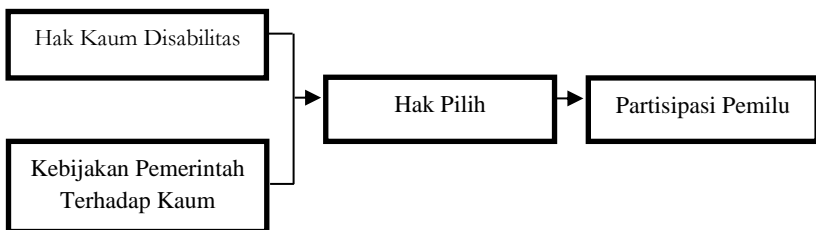
Kalau timbul kompetisi memperebutkan kekuasaan, strategi yang biasa digunakan oleh kelompok-kelompok yang saling berhadapan adalah mencapai dukungan rakyat. Dalam hal ini mereka tentu menganggap sah dan memperjuangkan ide-ide partisipasi massa dan akibatnya menimbulkan gerakan-gerakan yang menuntut agar “hak-hak” ini dipenuhi. Jadi kelas-kelas menengah dalam perjuangannya melawan kaum buruh dan membantu memperluas hak pilih rakyat.

- 5) Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan.

Perluasan kegiatan pemerintah dalam bidang-bidang kebijaksanaan baru biasanya berarti bahwa konsekuensi tindakan-tindakan pemerintah menjadi semakin menyusup pada kehidupan sehari-hari rakyat. Tanpa hak-hak sah atas partisipasi politik, individu-individu betul-betul tidak berbahaya menghadapi dan dengan mudah dapat merugikan kepentingannya.<sup>30</sup>

Teori ini tentunya digunakan untuk menganalisis tingkat partisipasi kaum difabel terhadap kegiatan-kegiatan politik, sebagai pemenuhan hak-hak mereka terlebih dalam pemilihan umum

### Arah Kerangka Konseptual



---

<sup>30</sup> A. A Said Gatara, dan Mohd. Dzulkiah Said, "*Sosiologi Politik : Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*", edisi 2007, h. 90.



**BAB III**

## ***PROFIL PERSATUAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA (PPDI)***

Persatuan Penyandang Cacat Indonesia (PPCI) yang kini sudah berganti nama menjadi Persatuan Penyandang Difabel Indonesia disingkat PPDI merupakan organisasi payung dan beranggotakan beragam organisasi sosial kecacatan di Indonesia yang didirikan tahun 1987.<sup>31</sup> PPDI adalah payung bagi organisasi sosial penyandang difabel, organisasi sosial difabel dan organisasi kemasyarakatan penyandang difabel sesuai dengan tingkat kedudukannya berfungsi sebagai wadah perjuangan, koordinasi, konsultasi, advokasi dan sosialisasi difabel di tingkat nasional dan internasional. Visi PPDI adalah terwujudnya partisipasi penuh dan kesamaan kesempatan penyandang difabel dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Misi PPDI adalah 1) Melakukan kordinasi dan konsultasi tentang semua hal yang berkaitan dengan isu difabel; 2) Melakukan advokasi terhadap perjuangan hak dan peningkatan kesejahteraan penyandang difabel; 3) Menyediakan kewajiban dan hak penyandang difabel sebagai

---

<sup>31</sup> Diakses dari <https://ppdi.or.id/profil-ppdi> pada 14 Oktober 2017 pukul 19.11.

warga negara Indonesia; 4) Mengupayakan keterpaduan langkah, potensi penyandang difabel dalam rangka peningkatan kualitas, efektifitas dan relevansi atas kemitraan yang saling menguntungkan dan bermatabat; 5) Meberdayakan penyandang difabel agar turut berperan serta sebagai pelaku pembangunan yang mandiri, produktif dan berinteraksi; 6) Melakukan kampanye kepedulian dan kesadaran publik sebagai media sosialisasi dan informasi tentang penyandang difabel.<sup>32</sup>

Organisasi ini lahir tgl. 11 Maret 1987 di Jakarta dengan nama PERSATUAN PENYANDANG CACAT INDONESIA. Disahkan oleh Menteri Sosial RI dengan Keputusan Menteri Sosial RI nomor : 9.B/HUK/ 1987. Berdasarkan keputusan MUNASLUB PPCI di Balikpapan Kalimantan Timur tanggal 11 - 14 Desember 2012 bahwa nama organisasi secara resmi telah diganti dengan nama : PERSATUAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA (PPDI). PPDI merupakan wadah konsultatif dan koordinatif serta berhimpunnya organisasi Nasional yang bergerak dalam bidang kecacatan. PPDI bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial dalam arti seluas luasnya

---

<sup>32</sup> Diakses dari <https://ppdi.or.id/profil-ppdi> pada 14 Oktober 2017 pukul 19.11.

bagi penyandang cacat bersama sama Pemerintah dan masyarakat. Kami adalah perpanjangan tangan PPDI Pusat yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan yg ber ibukota di Makassar. Alamat sekarang di Kompleks Maizonet Jl. Melati Raya Blok A.I No. 15 Telp (0411) 869426, Kota Makassar.

Aksesibilitas Fisik: Sebagai barometer implementasi aksesibilitas fisik di Kota Makassar bisa dilihat di Kota Makassar. Sesuai survei aksesibilitas fisik ada sekitar 0,1 % fasilitas sosial (fasos) dan fasum (fasilitas umum) yang telah menyediakan aksesibilitas fisik di Kota Makassar. Sekitar 14 tempat di Kota Makassar sudah menyediakan aksesibilitas. Ke 14 tempat itu yaitu:

1. Kantor Gubernur Sulawesi Selatan.
2. Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya ( PSBDW ) Makassar.
3. Bank Tabungan Pensiun Nasional ( BTPN ).
4. Jalan Sudirman.
5. Mesjid PU ( Pekerjaan Umum ).
6. Mesjid Raya.
7. Kantor Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Makassar.
8. Kantor Pos Besar di Jalan Slamet Riyadi.
9. SLB Pembina Parang Tambung.
10. Madrasah Ibtidaiyah Kalukuang.

11. Karebosi Links.
12. Hotel Horison.
13. Rumah Sakit Grestelina.
14. Bandara Sultan Hasanuddin

Kantor pemerintah mendapatkan bantuan dari Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Makassar sebagai contoh untuk ditindaklanjuti oleh pihak yang dibantu. Namun kenyataannya semua pihak yang dibantu, tidak berusaha untuk menyempurnakannya. Banyak dari instansi yang dibantu tidak paham apa itu aksesibilitas. Hal ini menunjukkan indikasi kurangnya kesadaran dan kepedulian baik di kalangan birokrat maupun masyarakat lainnya. Apalagi aksesibilitas di bidang transportasi. Sampai sekarang belum ada satupun angkutan umum (bus) yang menyediakan tempat duduk bagi penyandang disabilitas. Kekurangan aksesibilitas fisik di bidang: pendidikan (sekolah-sekolah), kesehatan (Rumah Sakit), transportasi (kendaraan umum dan terminal-terminal), olahraga (stadion dan sarana olah raga). Trotoar-trotoar sepanjang jalan yang seharusnya aksesibel bagi penyandang disabilitas dan merupakan hak pejalan kaki, kondisinya sangat memperihatinkan dari sisi ketentuan standar aksesibilitas. Sedangkan Kota/Kabupaten lain sangat

tidak memperhatikan masalah aksesibilitas fisik bangunan dan lingkungan

Adapun masalah-masalah dalam Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia yaitu :

1. Masalah di Bidang Politik dan Keamanan

Kondisi Negara sekarang ini dimana-mana konflik dan kericuhan kerap terjadi. Hal ini kemudian menciptakan suasana yang tidak aman dan tidak nyaman bagi warga Negara yang menginginkan kedamaian dan ketenangan. Tidak terkecuali di Kota Makassar, Walaupun kondisi keamanan yang dalam kurun terakhir ini, dilanda cukup banyak kejadian dan kurang kondusif, akan tetapi konflik dan kericuhan masih dapat dikendalikan. Kondisi ini tentunya memberikan dampak positif bagi kemanan yang dilakukan oleh aparat yang cukup baik, walaupun kondisi seperti hal tersebut, bukan tidak mungkin dapat terjadi *chaos* dimana-mana.

Keamanan bagi penyandang disabilitas yang kebanyakan sangat sulit diatasi, bahkan tingginya mobilitasnya akan sangat beresiko ketika kondisi keamanan yang tidak terkendali. Penyandang disabilitas kini sangatlah memerlukan perlindungan dan perlakuan khusus, utamanya penyandang disabilitas perempuan dan anak-anak. Jelas dari hal tersebut, sangatlah memerlukan penanganan khusus dan harus

didahulukan jika terjadi suatu konflik disuatu daerah. Selain dari masalah keamanan diatas, juga partisipasi dari para penyandang disabilitas dalam bidang politik masih sangat terhambat, utmanaya dalam hal menyalurkan aspirasi politiknya baik disaat untuk memilih pemimpin mereka maupun untuk dipilih sebagai pemimpin bagi masyarakat lainnya

Masalah pemilihan umum kepala daerah (pemilukada), dimana setiap warga Negara yang sudah mempunyai hak pilih termasuk penyandang disabilitas berhak untuk memilih dan dipilih. Dalam hal hak memilih, seorang penyandang disabilitas harus memilih di TPS. Namun kenyataan memperlihatkan pada kita banyak sekali tempat-tempat TPS yang berlokasi ditempat yang tidak aksesibel, sehingga menghambat partisipasi politik bagi penyandang disabilitas khususnya bagi pengguna kursi roda, penyandang disabilitas netra dan penyandang disabilitas rungu yang kesulitan mendapat informasi. Sedangkan untuk ikut dalam pencalonan legislatif maupun kepala daerah terhambat dengan persyaratan sehat jasmani dan rohani dimana pada persyaratan sehat jasmani dan rohani oleh sebagian dari dokter penguji kesehatan dipersepsikan bahwa disabilitas itu identik dengan tidak sehat jasmani dan rohani. Persepsi

tersebut yang diwujudkan sebagai keterangan sehat oleh dokter, telah ikut andil menghalangi penyandang disabilitas untuk tidak maju dalam pemilihan kepala daerah.

2. Kendala-kendala yang dihadapi Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia:

- a) Belum adanya sarana Gedung Sekretariat dan Tempat Usaha/ Kegiatan yang tetap dan representatif. Sekretariat yang selalu berpindah-pindah karena waktu sewa/kontrak habis. Sehingga untuk melakukan usaha sering tersendat.
- b) Masih kurang/ lemahnya SDM penyandang cacat pada umumnya dan Pengurus khususnya. Kecilnya dana operasional, tidak cukup mengcover semua kegiatan yang telah direncanakan.
- c) Kurangnya kesadaran sebagian besar penyandang cacat tentang organisasi penyandang cacat atau tentang organisasi

3. Masalah Aksesibilitas baik fisik maupun non fisik

Permasalahan penyandang disabilitas adalah sangat kompleks. Bukan hanya masalah pendataan saja. Juga keterbatasan aksesibilitas baik fisik maupun non fisik para



penyandang disabilitas untuk melakukan aktifitas sesuai dengan jenis kedisabilitasannya, seperti terbatasnya aksesibilitas yang tersedia terutama pada prasarana umum, baik itu bangunan kantor, bangunan pendidikan, bangunan kesehatan, Mall-Mall, Kantor-kantor perusahaan, terminal maupun di Pelabuhan dan Bandara. Tapi juga ada masalah pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pelatihan, rehabilitasi, akses informasi dan teknologi, transportasi, politik, keamanan, hukum, olahraga dan berusaha. Penyandang disabilitas di Kota Makassar yang jumlahnya 2.250 orang (disabilitas tubuh, disabilitas Netra, dan Disabilitas ganda) memerlukan bantuan penyediaan aksesibilitas sesuai dengan kedisabilitasannya.

Adapun tiga fungsi utama Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) yang telah dijalankan oleh yaitu:

a. Inspire

Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) telah menginspirasi dengan cara membangun kepercayaan diri kepada semua anggotanya. Pengurus dan anggota bersinergi dan saling memberi inspirasi satu sama lain. Berada pada lingkungan yang memiliki keterbatasan membuat anggota lebih bisa menghargai apa yang telah mereka miliki dan

mengambil pelajaran hidup darinya. Hampir semua anggota Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) mengalami perubahan yang signifikan antara sebelum dan setelah menjadi anggota perkumpulan. Salah satu bentuk perubahan yang nyata adalah sebelum bergabung dengan perkumpulan para penyandang difabel tidak berani bepergian jauh tanpa didampingi orang tua karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan, padahal usianya sudah cukup dewasa. Namun setelah bergabung dengan komunitas yang kegiatannya sudah terjadwal dan rutin, perlahan-lahan mereka berusaha untuk mandiri bepergian menggunakan angkutan *online*.

b. Inform

Pada dasarnya fungsi *inform* pada Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), dilaksanakan melalui dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Penyampaian informasi secara langsung dilakukan melalui pertemuan bulanan dan rapat internal pengurus perkumpulan untuk membahas topik atau hal-hal yang sedang marak terjadi pada bulan tersebut, menyelesaikan permasalahan yang terjadi antaranggota dan

membahas perencanaan agenda di bulan-bulan selanjutnya. Sementara itu, penyampaian secara tidak langsung disampaikan melalui aplikasi *WhatsApp Group Chatting* yang dimanfaatkan untuk membagikan informasi mengenai kebijakan baru dari pemerintah.

c. Improve

Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) selalu berusaha untuk menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah. Seperti yang diungkapkan oleh pengurus perkumpulan penyandang disabilitas, bahwa mereka terbuka kepada siapa saja yang mengajak kerja sama baik pemerintah atau swasta agar pemerintah dapat mengenal organisasi Difabel dengan baik sehingga saran dan kritiknya bisa diterima dan direspon dengan baik pula. Organisasi Difabel juga kerap diundang dalam pelatihan, acara-acara formal maupun forum diskusi pemerintahan terkait permasalahan difabel, terutama di Kota-kota besar dan Provinsi yang memiliki jumlah penderita kaum difabel. Pada dasarnya, menurut informasi yang diperoleh dari pendiri Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), peran organisasi ini, dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah pada

intinya yaitu audiensi dan mengikuti kegiatan rapat. Bukan hanya turut hadir, tetapi juga aktif memberi masukan dan kritik.

Landasan hukum dalam pemenuhan hak ketenagakerjaan bagi penyandang difabel di daerah-daerah yang padat akan penduduk, sudah tercantum dalam aturan tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Sehingga fungsi dari Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) dalam turut membantu untuk menyukseskan Pemenuhan Hak Ketenagakerjaan, diantaranya;

1. Memberikan Pelatihan Kerja

Pelatihan kerja merupakan salah satu bentuk peningkatan kapasitas dan keterampilan untuk tenaga kerja difabel dalam bekerja. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap empat tenaga kerja difabel yang bekerja di perusahaan, mereka semua telah mendapatkan pelatihan kerja. Masa training kerja yang diberikan oleh perusahaan berbeda-beda. Hal ini membuktikan bahwa semua tenaga kerja difabel telah mendapatkan hak pelatihan kerjanya di perusahaan.

Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) juga turut berperan dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan pelatihan bekerjasama dengan Pemerintah Kota Semarang. Tujuan dari pelatihan itu adalah untuk meningkatkan keterampilan dan kesetaraan difabel, sehingga mereka memiliki rasa percaya diri dan memiliki daya juang untuk bersaing di dunia kerja. Selain bekerjasama dengan pemerintah kota, Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) juga menjadikan pelatihan sebagai kegiatan rutinnya untuk memberdayakan penyandang difabel.

Pada dasarnya kegiatan pelatihan yang diadakan oleh Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) adalah untuk mengasah bakat penyandang difabel baik yang masih usia anak-anak maupun dewasa atau usia kerja. Para penyandang difabel khususnya di Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) diarahkan untuk menjadi wirausahawan agar tidak bergantung pada orang lain. Selain itu mereka didorong agar bisa memberdayakan diri sendiri dan mendapatkan penghasilan dari usahanya.

## 2. Informasi Penempatan Kerja

Dalam pemenuhan hak memperoleh informasi, Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) berperan sebagai penyedia data. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan bahwa mereka meminta bantuan kepada Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) untuk memberikan informasi dan data mengenai jumlah dan jenis penyandang difabel usia kerja dan kompetensi yang dimiliki penyandang difabel usia kerja. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa ada hubungan timbal balik antara pemerintah dan organisasi kaum difabel. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan memperoleh informasi tentang penyandang difabel usia kerja dari organisasi kaum difabel, sementara itu Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) sebagai penyedia data juga bisa meneruskan informasi resmi ini kepada penyandang difabel yang sedang mencari lowongan pekerjaan.

3. Penerimaan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kerja Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) sendiri tidak memiliki target yang terlalu jauh untuk menempatkan anggotanya menjadi Aparatur Sipil Negara maupun karyawan di perusahaan. Akan tetapi

selalu memberi arahan kepada anggotanya untuk mereka bisa bekerja dan berkarya sendiri. Alasannya karena rata-rata anggota Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) merupakan Orang dengan Kedisabilitasan Berat (ODKB) atau setengah berat. Maka dari itu, para penyandang difabel di organisasi tersebut, tidak disarankan untuk bekerja di perusahaan. Justru sebaliknya, penyandang difabel yang di luar Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) yang direkomendasikan untuk bekerja di perusahaan.

#### 4. Perluasan Kesempatan Kerja

Ketidakesesuaian antara kualifikasi kompetensi tenaga kerja dan persyaratan kerja membuat banyak dari penyandang difabel memutuskan untuk menjadi wirausahawan. Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) aktif mengikutsertakan anggotanya dalam kegiatan-kegiatan pameran yang cukup diperhitungkan sebagian besar penyandang difabel di Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) yang berusia angkatan kerja memilih untuk membuka usaha mandiri atau UMKM. Sehingga dari hal tersebut, paling tidaknya menjadi sebuah media

berkumpul dan menuangkan kreativitas para penyandang difabel, menyediakan tempat untuk memasarkan berbagai produk karya anggotanya di dalam sebuah etalase. Para penyandang difabel yang mayoritas difabel daksa yang mempunyai karya berupa kerajinan tangan atau *handycraft* diberi ruang untuk memamerkan hasil karyanya di UKM milik komunitas yang bernama “*Saung Happy Difabel*”

Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia, sekarang ini juga telah berupaya menyalurkan aspirasi dan kedaulatan tekad mereka, untuk memberdayakan kaum difabel kepada pemerintah. bentuk tekad ini, kemudian berupa sebuah hasil dari kebijakan dan program yang kemudian dicanangkan oleh pemerintah.

Sejak adanya perubahan data disabilitas dari indikator kesehatan menjadi indikator kesejahteraan sosial, persoalan disabilitas menjadi masalah sektor sosial. Menurut No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial dan Keputusan Menteri Sosial No.82/HUK/2005 Tentang Tugas dan Tata Kerja Departemen Sosial yang menyatakan bahwa *focal point* dalam penanganan permasalahan penyandang disabilitas di Indonesia adalah Kementerian Sosial RI. Tugas tersebut lebih diarahkan pada upaya pelayanan dan rehabilitasi sosial, yaitu



proses refungsionalisasi dan pengembangan diri masyarakat untuk memungkinkan bagi penyandang disabilitas dalam melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu pula, Kementrian Sosial juga diberi mandat oleh UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat untuk pemberian bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Sasaran utama program- program disabilitas di bawah Kementerian Sosial RI adalah penyandang disabilitas, diikuti keluarga dan masyarakat sebagai sasaran pendukung.

Program tersebut adalah:

1. Rehabilitasi Sosial Berbasis Non-Institusi

- a) UPSK (Unit Pelayanan Sosial Keliling)

Unit Pelayanan Sosial Keliling adalah sarana pelayanan bergerak yang kegiatannya diarahkan untuk menjangkau lokasi penyandang disabilitas atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lain sampai ke tingkat desa agar dapat memperoleh pelayanan kesejahteraan sosial sedini mungkin, sehingga permasalahan dapat diatasi secara cepat. UPSK berada di 33 propinsi.

- b) LBK (Loka Bina Karya)

Ditujukan agar penyandang disabilitas mendapatkan akses pelayanan dan rehabilitasi sosial, dengan menitikberatkan pada bimbingan keterampilan. Penerima manfaat dari LBK ini adalah penyandang disabilitas ringan Pada saat otonomi daerah tercatat 321 LBK yang pengelolaannya diserahkan pada pemerintah kabupaten/kota, Namun sekarang kondisinya tinggal 204 yang masih berfungsi, 104 telah beralih fungsi, dan 13 sama sekali tidak berfungsi. Sejak tahun 2008 Kementerian Sosial telah dilakukan rehabilitasi gedung dan melengkapi kembali peralatan beberapa LBK

## 2. Rehabilitasi Sosial Berbasis Institusi

Terdapat 19 Unit Pelaksana Teknis (UPT) berupa panti dan 2 Balai Besar yang merupakan pusat / lembaga pelayanan dan rehabilitasi yang melayani penyandang disabilitas netra, rungu wicara, tubuh dan eks penyakit kronis, mental retardasi, mental eks psikotik yang langsung pengelolannya berada di bawah Kementerian Sosial . Disamping itu juga terdapat 22 pusat / lembaga

yang dikelola pemerintah daerah dan 321 panti yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pelayanan rehabilitasi sosial berbasis panti juga dilakukan dalam bentuk multitarget group melalui sistem *day care* dan program khusus melalui *out reach services*. Selain itu, panti-panti juga dijadikan sebagai pusat rujukan pelayanan penyandang disabilitas dari program RBM dan UPSK.

### 3. Rehabilitasi Berbasis Keluarga/Masyarakat (RBM).

Ditujukan untuk memobilisasi masyarakat dalam memberikan bantuan dan dukungan bagi penyandang disabilitas dan keluarganya dengan memanfaatkan potensi sumber kesejahteraan sosial setempat. Program RBM digerakan oleh kader dari masyarakat dalam suatu tim yang anggotanya terdiri dari berbagai unsur terkait dan tokoh masyarakat serta keluarga dan kelompok penyandang disabilitas. Kegiatan utamanya melakukan deteksi dini terhadap kondisi disabilitas dan pelaksanaan rujukan pada sumber potensial sesuai kebutuhan penyandang disabilitas. Idealnya dengan adanya UPSK di suatu

lokasi maka perlu adanya RBM, namun masih perlu pembinaan lebih lanjut terhadap RBM.

4. Bantuan Sosial bagi Organisasi Sosial yang bergerak di bidang Disabilitas Ditujukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperluas jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas. Bantuan sosial bagi organisasi Tahun 2009 bantuan sosial diberikan kepada 27 orsos yang terdiri atas 25 organisasi penyandang disabilitas dan 2 panti yang menangani penyandang disabilitas ganda. Bantuan terutama untuk kegiatan operasional organisasi yang bersangkutan.

5. Bantuan Tanggap Darurat  
Bantuan Tanggap Darurat ditujukan untuk penyandang disabilitas yang mengalami keterlantaran, diskriminasi, eksploitasi, tindak kekerasan korban bencana, maupun orang yang mengalami disabilitas sebagai akibat dari bencana. Bantuan yang disalurkan tahun 2009 di Garut kepada 5 orang penyandang disabilitas disabilitas berbentuk alat bantu dan bantuan sosial masing-

masing Rp. 1.000.000,- Demikian pula di Sumatera Barat, 50 orang yang mendapat alat bantu dan 56 orang mendapat bantuan sosial. Lokasi lain yang mendapat bantuan tanggap darurat adalah Depok, Sukabumi, dan Ciamis, Jawa Timur (Ngawi) dan DKI Jakarta. Jenis disabilitas yang ditangani yaitu netra, mental eks psikotik, tubuh, rahita, tunalaras, tunarungu wicara, dan penyakit kronis. Program dan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas tersebut dilaksanakan melalui tiga sistem: i) *Institutional-based* yang mencakup program reguler, multilayanan, dan *multi target group* melalui *day care* dan subsidi silang, dan program khusus yang meliputi *outreach* (penjangkauan), Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK), dan bantuan ahli kepada organisasi sosial dan rehabilitasi sosial berbasis masyarakat; ii) *Non-institutional-based* yang mencakup pelayanan pendampingan dengan pendekatan *family-based* dan *community-based* yang menyelenggarakan Rehabilitasi Basis Masyarakat (RBM); iii) pelayanan sosial lainnya mencakup Loka Bina Karya, PBK, Usaha Ekonomi

Produktif/Kelompok Usaha Bersama  
(UEP/KUBE).

6. Jaminan Sosial Penyandang Disabilitas Berat

Merupakan program pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial yang mempertahankan hidup penyandang disabilitas berat. Estimasi jumlah penyandang disabilitas berat adalah 163.232 orang dan jumlah penerima jaminan sosial penyandang disabilitas berat sebanyak sebanyak 17.000 orang. Kepada mereka diberikan bantuan sosial dalam bentuk uang tunai sebesar Rp 300.000 per orang per bulan selama setahun yang penyalurannya bekerja sama dengan PT Pos Indonesia. Kriteria penerima jaminan sosial penyandang disabilitas berat adalah : yang memiliki disabilitas yang tidak dapat direhabilitasi kembali; tidak dapat melakukan sendiri aktivitas sehari-hari, kecuali dengan bantuan orang lain; sepanjang waktu aktifitas kehidupannya sangat bergantung pada bantuan orang lain; tidak tinggal dalam panti dan tidak mampu menghidupi diri sendiri serta berasal dari keluarga miskin.

# BAB IV

## ***BENTUK PERHATIAN PPD I TERHADAP HAK POLITIK KAUM DIFABEL***

Persatuan Penyandang Difabel Indonesia Kota Makassar, yang diwakili oleh Bambang Permadi menyatakan bahwa penegakan hak-hak penyandang difabel tidak berhenti di level undang-undang, tetapi sampai ke peraturan daerah. Undang-Undang 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Difabel pasal 13 menegaskan Hak Politik Penyandang Difabel meliputi hak memilih dan dipilih dalam suatu jabatan publik, memiliki hak untuk dapat menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun secara lisan, dapat memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum, membentuk partai politik maupun komunitas lainnya, yang kemudian menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik didalamnya, dapat membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Difabel serta berperan penting secara aktif dalam sistem pemilihan umum, memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala



desa atau nama lain, dan memperoleh pendidikan politik.”<sup>33</sup> Juga tertera dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Difabel.

Wujud partisipasi politik tidak hanya datang dan memilih dalam bilik suara, namun juga hak untuk dipilih menjadi pejabat politik dan pengurus partai yang bagi penyandang disabilitas menunjukkan spectrum demokrasi yang lebih luas. Peraturan daerah Kota Makassar menggenapi perhatian Negara terhadap penyandang disabilitas.

Merujuk dari empat hak kaum disabilitas, hak untuk memilih adalah hak konstitusional warga negara, sedangkan semua warga negara tidak dapat di diskriminasi atas dasar apapun juga. Hak memilih dimiliki oleh seluruh warga negara, sebagaimana di jelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor : 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas<sup>34</sup> dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pasal 13 menegaskan hak politik penyandang disabilitas.

---

<sup>33</sup> Hasil wawancara dengan salah satu informan, kaum disabilitas Bambang Permadi, lembaga Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Kota Makassar, pada 10 Oktober 2017.

<sup>34</sup> Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor : 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Sekalipun pemilihan umum bukan satu-satunya tolok ukur dalam sistem demokrasi.<sup>35</sup> Namun dengan pemilihan umum tergambar bagaimana negara memperlakukan warganya dalam sistem politik, demi mewujudkan adanya hak kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat yang merupakan wujud sejatinya dari partisipasi warga negara.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 mengenai setiap penyandang disabilitas harus bebas dari adanya peniksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat yang dapat membahayakan kehidupannya.

Berkaitan dengan hak-hak bagi penyandang disabilitas, maka pemerintah Indonesia dalam merealisasikan tujuan tersebut, telah menandatangani *Convention on the Rights*

---

<sup>35</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, h. 461.

*of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Penandatanganan tersebut menunjukkan kesungguhan Negara Indonesia untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para penyandang disabilitas.

Tujuan konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Dalam pemilu, ketersediaan sarana dan prasarana yang mudah diakses bagi pemilih penyandang disabilitas dan prinsip *luber dan jurdil* dapat tercapai, pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) merumuskan beberapa peraturan terkait. Peraturan-peraturan yang diatur dalam Undang-undang meliputi:

- a) Selain Perlengkapan pemungutan suara, KPU juga mendistribusikan alat bantu tuna netra demi menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara (pasal 142 ayat (2) jo penjelasan 142 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dan pasal 105 ayat (2) jo

penjelasan pasal 105 ayat (2) UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wapres).

- b) Saat memberikan suaranya, pemilih penyandang disabilitas dapat dibantu oleh orang lain yang dipilihnya dan orang tersebut wajib merahasiakan pilihannya. (pasal 156 UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dan pasal 119 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wapres).
- c) Dalam pemilu legislatif, asas kerahasiaan tersebut juga berlaku bagi pemilih penyandang disabilitas yang bermukim di luar negeri (pasal 164 UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD).
- d) Dalam pemilu presiden dan wapres, bagi pemilih penyandang disabilitas yang bermukim di luar negeri dan tidak dapat memberikan suaranya di TPSLN, dapat memberikan suaranya melalui pos yang disampaikan kepada PPLN di perwakilan RI setempat (pasal 120 ayat (2) UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wapres).

Sanksi diberikan kepada orang yang membantu pemilih penyandang disabilitas yang dengan sengaja

memberitahukan pilihannya kepada orang lain, yaitu pidana penjara minimal tiga bulan dan maksimal satu tahun dan denda minimal tiga juta rupiah dan maksimal dua belas juta rupiah (pasal 295 UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dan pasal 241 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wapres).

Kaum disabilitas secara kuantitas cenderung meningkat, sehingga dari hal tersebut, perlu diterapkan upaya dalam peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat dan disabilitas lainnya. Dalam rangka terwujudnya kesamaan kedudukan, hak, kewajiban, dan peran sebagaimana tersebut di atas, dipandang perlu untuk memberikan landasan hukum bagi upaya peningkatan kesejahteraan, penyandang disabilitas di segala aspek kehidupan dan penghidupan dalam suatu undang-undang. Tingkat berat ringannya keadaan cacat yang disandang seseorang dapat memberikan peluang kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan yang layak bagi mereka.

Persatuan Penyandang Difabel Indonesia (PPDI) sebagai payung bagi organisasi sosial penyandang disabilitas sekaligus sebagai organisasi sosial disabilitas dan organisasi kemasyarakatan penyandang disabilitas sesuai dengan tingkat

kedudukannya, berfungsi sebagai wadah perjuangan, koordinasi, konsultasi, advokasi dan sosialisasi disabilitas di tingkat regional, nasional dan internasional. Persatuan Penyandang Difabel Indonesia pula, bertujuan dalam memperjuangkan kesetaraan dan pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas agar dapat memperoleh kesamaan dan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan serta dapat berpartisipasi penuh dalam rangka pengambilan pembangunan nasional.

Adapun tugas dan usaha persatuan penyandang disabilitas Indonesia untuk melihat fungsinya yaitu:

- 1) Tugas Pokok dan Usaha Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia:
  - a) Mengadakan koordinasi, konsultasi dengan organisasi kecacatan dalam rangka peningkatan mutu dan pelayanan kesejahteraan penyandang cacat.
  - b) Memberikan masukan kepada Pemerintah dalam upaya peningkatan kebijaksanaan dan program dibidang kesejahteraan penyandang cacat.
  - c) Melindungi dan memperjuangkan kepentingan penyandang cacat dan organisasi penyandang

cacat dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosialnya.

2) Usaha-Usaha yang dilaksanakan Persatuan

Penyandang Disabilitas:

- a) Turut memasyarakatkan peraturan perundang-undangan serta kebijaksanaan pemerintah dalam usaha kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat.
- b) Menjembatani kepentingan para penyandang cacat dengan Pemerintah dan masyarakat.
- c) Membina keakraban, kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial antar penyandang cacat dan antara penyandang cacat dan masyarakat.
- d) Bersama Pemerintah dan masyarakat mendorong, menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran diri, harga diri, kemauan dan kemampuan penyandang cacat agar secara mandiri dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan serta dalam Pembangunan Nasional.
- e) Menggali dan meningkatkan potensi sumber daya dan dana yang berasal dari masyarakat baik dari dalam maupun luar negeri.

Demi mendukung perannya dalam memasyarakatkan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah lainnya dalam bidang politik maka Persatuan Penyandang Difabel Indonesia (PPDI) telah memberikan berbagai pelatihan bagi kaum disabilitas disetiap lembaga-lembaga yang ada dibawah naungannya. Selain itu pula, mereka telah mensosialisasikan dari kebijakan pemerintah serta memastikan bahwa implementasi kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tersebut, dapat berjalan dengan semestinya. Sehingga dari hak-hak politik kaum disabilitas, seperti memilih dan dipilih, baik sebagai kepala daerah (Gubernur, Walikota/ Bupati) maupun sebagai wakil rakyat yang duduk di pusat maupun yang ada didaerah dapat terpenuhi.

Salah satu bentuk nyata dari perhatian Persatuan Penyandang Difabel Indonesia (PPDI) kepada kaum disabilitas sebagaimana dikemukakan sebelumnya, oleh Bambang Permadi (Ketua PPDI) bahwa pada bulan November 2014 lalu, organisasi tersebut telah mengkoordinir kaum disabilitas pada saat kegiatan workshop RUU disabilitas, sosialisasi relawan demokrasi, sosialisasi dari Undang-Undang No. 19 tahun 2011 dan sosialisasi pemilu,



serta juga monitoring pemilu 2014 di Tempat Pemilihan Suara (TPS).

Demi mendukung perannya untuk memasyarakatkan perundang-undangan serta kebijakan pemerintah dalam bidang politik, maka Persatuan Penyandang Difabel Indonesia (PPDI) memberikan pelatihan kaum disabilitas disetiap lembaga-lembaga yang ada dibawah naungannya. Selain mensosialisasikan kebijakan pemerintah, Persatuan Penyandang Difabel Indonesia (PPDI) juga memastikan bahwa implementasi kebijakan tersebut berjalan dengan semestinya, bahwa hak-hak politik kaum disabilitas untuk memilih dan dipilih, terpenuhi.

Salah satu bentuk nyata perhatian Persatuan Penyandang Difabel Indonesia (PPDI) kepada kaum disabilitas sebagaimana dikemukakan oleh Bambang Permadi (Ketua PPDI) bahwa pada November 2014 organisasi tersebut mengkoordinir kaum disabilitas pada saat workshop RUU Disabilitas, sosialisasi relawan demokrasi, sosialisasi UU No. 19 Tahun 2011, sosialisasi pemilu dan monitoring pemilu 2014 di TPS (Tempat Pemilihan Suara).

Selain dari partisipasi Persatuan Penyandang Difabel Indonesia (PPDI) kepada kaum difabel, juga melalui sosialisasi Surat Suara Khusus Disabilitas yang kemudian

berintegrasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di wilayah Provinsi Sulawesi-Selatan, khususnya KPU Kota Makassar.

Peranan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyosialisasikan kegiatan Pemilu kepada masyarakat bertujuan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat agar bersedia memberikan suaranya pada saat pemungutan suara. Tingginya partisipasi merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan sosialisasi KPU, termasuk partisipasi kaum disabilitas.

KPU menurut UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu adalah pelaksana dan sekaligus pengawas pelaksanaan pemilu. Seharusnya KPU adalah penyelenggara yang mana dalam konsep penyelenggaraan itu tercakup pengertian dan pengawasan. Karena itu, KPU sebagai penyelenggara cukup menjalankan fungsi sebagai *policy maker* dan *regulator*. Sedangkan untuk pelaksanaan pemilu KPU membentuk Panitia Pelaksana Pemilu, dan untuk pengawasan oleh KPU dapat dibentuk Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Baik panitia pelaksana pemilu maupun panitia pengawas pemilu bersifat *ad hoc*, dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada

KPU, serta anggota-anggota dan pimpinannya diangkat dan diberhentikan oleh KPU.<sup>36</sup>

KPU tidak hanya memfasilitasi orang-orang normal dalam rangkaian pelaksanaan pemilu, namun juga warga Negara yang berkebutuhan khusus tanpa membedakannya dengan warga normal. Adapun bentuk-bentuknya adalah:

#### **a. Pra Pemilu**

Partisipasi politik terwujud melalui keikutsertaan sosialisasi, motivasi diri terlibat politik, pemahaman akan calon yang akan dipilihnya. Motivasi yang mendorong penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam pemilu adalah hak pilih merupakan hak setiap warga negara. Mereka berharap bahwa melalui pemilu hak-haknya dapat didengar layaknya masyarakat pada umumnya. Namun ada pula yang berpartisipasi karena diminta oleh keluarganya yang selama ini mengurus mereka. Pemerintah melalui KPU wajib melakukan sosialisasi bagi setiap warga Negara Indonesia, termasuk kepada kaum disabilitas.

Untuk menjalankan tugas di bidang sosialisasi secara structural KPU telah menjangkau semua tingkatan wilayah

---

<sup>36</sup> Muhammad Eky Malindo Putra, “Peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) di Kabupaten Bintan 2010”, E-Jurnal” (Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang 2015).

dan geografis karena di setiap wilayah dibentuk kepanjangan tangan KPU. Pada wilayah propinsi terdapat KPUD Propinsi, di wilayah Kabupaten/Kota dibentuk KPUD Kabupaten/Kota, di tingkat wilayah kecamatan dibentuk PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), di tingkat Desa/kelurahan terdapat PPS (Panitia pemungutan Suara). Pada saat pemungutan suara, di tiap-tiap TPS terdapat KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Upaya-upaya pemenuhan hak berpolitik penyandang disabilitas sehingga hak asasi penyandang disabilitas tidak dilanggar dan asas pemilu luber dan jurdil bisa terwujud. Upaya-upaya tersebut antara lain:

- a) Sosialisasi dan simulasi pemilu harus diselenggarakan tidak hanya di kota-kota besar, namun juga di daerah-daerah terpencil dengan menggunakan metode dan cara yang sesuai dengan kebutuhan pemilih tuna netra dan tuna rungu.
- b) Partisipasi dan kerjasama secara efektif dan penuh antara individu, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah harus lebih ditingkatkan agar sarana, prasarana, informasi, mekanisme dan materi pemilu mudah diakses dan dimanfaatkan oleh pemilih penyandang disabilitas.

- c) Pemerintah harus meningkatkan anggaran penyediaan alat bantu tuna netra agar alat bantu tuna netra juga tersedia untuk lembar surat suara pemilihan anggota legislatif.
- d) Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu harus menaruh perhatian khusus pada pelanggaran-pelanggaran terkait disabilitas sehingga hak berpolitik penyandang disabilitas tidak dirugikan.
- e) Yang terutama, merevisi peraturan perundang-undangan terkait yang tidak berpihak pada kaum penyandang disabilitas agar pemenuhan hak-haknya lebih terjamin.<sup>37</sup>

Merujuk pada hak politik yang dimiliki penyandang disabilitas, negara menjamin terhadap kaum penyandang disabilitas dalam hak politik dan kesempatan untuk menikmati hak tersebut atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya. Penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas, termasuk hak

---

<sup>37</sup> Diakses dari <https://ppdi.or.id/profil-ppdi> pada 14 Oktober 2017 pukul 19.11.

dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memilih, dipilih, pejabat publik dan pengurus partai. Memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan bahan-bahan pemilihan bersifat layak, dapat diakses serta mudah dipahami dan digunakan untuk melindungi hak penyandang disabilitas untuk memilih secara rahasia dalam pemilihan umum dan referendum publik tanpa intimidasi dan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, bilamana diperlukan atas permintaan mereka, mengizinkan bantuan dalam pemilihan oleh seseorang yang ditentukan mereka sendiri dan sebagainya.<sup>38</sup>

#### **b. Pada Saat Pemilihan**

Partisipasi politik yang ada dalam pemilu adalah pemberian hak suara. KPU sebagai penyelenggara pemilu yang bertugas untuk melaksanakan pemilu, memiliki kewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan warga negaranya agar dapat melaksanakan haknya untuk memberikan suara secara mandiri dan dengan mudah, serta asas-asas pemilu dapat ditegakkan.

Abdullah Mansyur menyatakan bahwa KPU punya relasi relawan demokrasi yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan pemilihan umum, mulai dari sosialisasi hingga

---

<sup>38</sup> Agus Andika Putra, "*Tingkat Partisipasi Politik Difabel Pada Pemilu Presiden Tahun 2014 di Kota Yogyakarta*", Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

pelaksanaan pemilu. Relawan ini bertugas untuk menuntun ke TPS (Tempat Pemilihan Suara) yang khusus untuk mereka. Pernyataan ini menunjukkan bahwa KPU sudah menjalankan fungsinya untuk memfasilitasi kaum disabilitas, meskipun keberadaan relawan ini masing mengundang pro dan kontra, tetapi setidaknya kaum disabilitas terbantu untuk dapat berpartisipasi pada pemilihan umum.

Untuk menjamin pasal-pasal dilaksanakan secara konsekuen, KPU merumuskan peraturan-peraturan yang mengatur lebih khusus partisipasi berpolitik penyandang disabilitas dalam pemilu. Pasal 8 ayat (3) Peraturan KPU No. 3 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPR Provinsi dan Kabupaten/Kota dan pasal 9 ayat (2) Peraturan KPU No. 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menegaskan kembali demi menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara KPU Kabupaten/Kota menyerahkan alat bantu tuna netra kepada KPPS. Selain itu, secara garis besar, Peraturan-peraturan yang

disusun oleh Komisi Pemilihan Umum terkait disabilitas meliputi:

- 1) Surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS harus menyebutkan adanya kemudahan bagi pemilih penyandang disabilitas dalam memberikan suara (pasal 15 ayat (2) Peraturan KPU No. 3 Tahun 2009).
- 2) Untuk melaksanakan pemungutan suara, KPPS menyiapkan dan mengatur antara lain:
  - a) Meja untuk meletakkan kotak suara diberi jarak kurang lebih 3 meter dari tempat duduk Ketua KPPS, ditempatkan di dekat pintu keluar TPS dan berhadapan dengan tempat duduk pemilih.
  - b) Jarak antara bilik pemberian suara dengan batas lebar TPS minimal 1 meter.
  - c) Meja/papan untuk menempatkan bilik suara dan untuk pemberian tanda pada surat suara, dan meja khusus bagi pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda (pasal 19 Peraturan KPU No. 3 Tahun 2009 dan pasal 30 Peraturan KPU No. 29 Tahun 2009).
- 3) TPS berlokasi di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh pemilih penyandang disabilitas



- (pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU No. 29 Tahun 2009).
- 4) TPS berukuran panjang 10 meter dan lebar 8 meter atau sesuai kondisi setempat (pasal 21 ayat 1 Peraturan KPU No. 3 Tahun 2009 dan pasal 22 ayat (1) Peraturan KPU No. 29 Tahun 2009).
  - 5) Pintu masuk dan keluar TPS harus dapat menjamin akses gerak bagi pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda (pasal 21 ayat (2) Peraturan KPU No. 3 Tahun 2009 dan pasal 22 ayat (1) Peraturan KPU No. 29 Tahun 2009).
  - 6) Pemilih penyandang disabilitas dipersilahkan terlebih dahulu memberikan suaranya atas seizin yang bersangkutan (pasal 28 Peraturan KPU No. 3 Tahun 2009 dan pasal 29 ayat (2) Peraturan KPU No. 29 Tahun 2009).
  - 7) Mekanisme dan teknis pemberian suara bagi pemilih penyandang disabilitas sama dengan pemilih lain, kecuali jika diperlukan dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaannya sendiri (pasal 30 Peraturan KPU No. 3 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan KPU No. 29 Tahun 2009).

- 8) Pemilih tuna netra menggunakan alat bantu tuna netra yang disediakan untuk memberikan suaranya dalam pemilu Anggota DPD (pasal 30 ayat (3) Peraturan KPU No. 3 Tahun 2009).
- 9) Atas permintaan pemilih penyandang disabilitas, Anggota KPPS kelima dan keenam atau orang yang ditunjuk oleh yang bersangkutan dapat bertugas memberikan bantuan dengan ketentuan:
  - a) bagi pemilih yang tidak dapat berjalan, Anggota KPPS kelima dan keenam membantu pemilih menuju bilik pemberian suara, dan pemberian tanda dilakukan oleh pemilih sendiri;
  - b) bagi pemilih yang tidak mempunyai kedua-dua tangan dan tuna netra, Anggota KPPS kelima membantu melakukan pemberian tanda sesuai kehendak pemilih dengan disaksikan oleh anggota KPPS keenam;
  - c) Bantuan orang lain, selain Anggota KPPS kelima dan keenam, atas permintaan pemilih yang bersangkutan, pemberian tanda dilakukan pemilih sendiri;

- d) Anggota KPPS dan orang lain yang membantu pemilih penyandang disabilitas wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan dan menandatangani Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (pasal 31 Peraturan KPU No. 3 Tahun 2009 dan pasal 32 Peraturan KPU No. 29 Tahun 2009).<sup>39</sup>

Istilah partisipasi politik telah digunakan dalam berbagai pengertian yang berkaitan dengan perilaku, sikap dan persepsi yang merupakan syarat mutlak bagi partisipasi politik. Partisipasi politik adalah perwujudan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang abash oleh rakyat dan dilakukan melakukan keterlibatan dalam pemilu. Pada pelaksanaan pemiliha legislatif Kota Makassar mutlak dibutuhkan partisipasi politik dari seluruh masyarakat termasuk juga dari para penyandang disabilitas. Pada pemilihan umum para penyandang disabilitas yang merupakan kelompok minoritas kurang diperhatikan keberadaannya.

Kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat selalu dihadapkan oleh berbagai pilihan, baik itu

---

<sup>39</sup> Diakses dari <https://ppdi.or.id/profil-ppdi> pada 14 Oktober 2017 pukul 19.11.

pilihan untuk hidupnya sendiri maupun untuk lingkungan masyarakat. Setiap individu yang hidup dan tinggal bersama individu lainnya memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam menentukan pilihan yang berpengaruh dalam hidupnya maupun lingkungan masyarakat.

Sosialisasi politik bertujuan memberikan pendidikan politik, membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik dan kesadaran politik, serta partisipasi politik rakyat. Pendidikan politik menjadi sangat penting untuk menumbuhkan budaya demokratis di masyarakat. Sosialisasi politik, walaupun hanya tentang pemilu, tetapi dalam kerangka yang lebih besar berkaitan erat dengan kepentingan Bangsa Indonesia untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang demokratis hanya terwujud apabila masyarakat sipil kuat atau berdaya. Kegiatan sosialisasi ini tidak dijalankan sendirian oleh KPU. Secara umum, semua lembaga politik berperan dalam sosialisasi politik, diantaranya adalah lembaga-lembaga negara, Bapilu (Badan Pengawas Pemilu) ditingkat nasional, Panitia Pengawas Pemilu di tingkat kabupaten/kota, dan terutama adalah partai-partai politik. Karena itu, KPU harus selalu menjalin komunikasi

dengan berbagai instansi pemerintah maupun dengan partai-partai politik peserta pemilu.<sup>40</sup>

Wawancara dilakukan dengan Bambang Permadi, lembaga Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Kota Makassar mengatakan :

*“Lembaga pemerintah memperhatikan hak disabilitas, pemerintah mengadakan seminar-seminar yang mengundang orang-orang KPU di bidangnya masih-masing contohnya proses dalam hal memilih dan menjadi pejabat, KPU mensosialisasikan bagaimana bentuk-bentuk dalam hal memilih dan menjadi pejabat, memberitahukan ke kaum disabilitas, kaum disabilitas bisa saja ikut dalam proses menjadi pejabat”.*<sup>41</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bentuk perhatian pemerintah memenuhi sebagai kewajibannya. Pemerintah memberikan perhatian kepada kaum disabilitas melalui sosialisasi yang mengundang KPU sebagai bentuk sosialisasi mengenai hak politik kaum disabilitas bisa ikut serta dalam

---

<sup>40</sup> M. Yusuf A.R, “Peran Komisi Pemilihan Umum (KPUP Dalam Pendidikan Politik”, *Jurnal*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas 45 Mataram, Vol. 4 No. 1 Februari 2010, h.15.

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan salah satu informan, Bambang Permadi, lembaga Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Kota Makassar, pada 10 Oktober 2017.

berpolitik. Walaupun keterbatasan fisik tetapi kaum disabilitas memiliki peluang untuk dapat ikut serta dalam politik.

### **c. Surat Suara Khusus Disabilitas**

Surat Suara Khusus Disabilitas pada dasarnya bagi orang yang berkebutuhan khusus (disabilitas), diantaranya orang yang hidup dengan karakteristik khusus dan memiliki perbedaan dengan orang lain pada umumnya. Karena karakteristik inilah memerlukan pelayanan khusus supaya mendapatkan hak-haknya. KPU juga memiliki kertas suara khusus disabilitas contohnya bagi tunanetra. Sebelum memberikan suaranya, kaum disabilitas juga berusaha untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan kandidat. Kaum disabilitas mengikuti perkembangan-perkembangan calon legislatif contohnya kaum disabilitas yang memiliki indra pendengaran yang masih baik bisa mengikuti aspirasi calon legislatif melalui media radio, sedangkan yang memiliki pendengaran yang parah atau tidak bisa mendengar dapat mengikuti perkembangan calon legislatif melalui media tv atau brosur.

Pada saat pemilu KPU Kota Makassar memfasilitasi kaum disabilitas dengan menyediakan surat suara dengan huruf *Braille*. Petugas menuntun kaum disabilitas dari proses pendaftaran sampai selesai. KPU juga telah mengatur

prosedur dan pelaksanaan TPS untuk melayani kaum disabilitas.

Bagi masyarakat kaum difabel dalam keikutsertaan mereka dalam kancah politik dan partisipasi politik mereka, tentunya ada hambatan dan tantangan yang dihadapi. Salah-satu Masalah yang bisa diidentifikasi, khususnya selama proses pemilihan umum berlangsung, yakni pada tahap persiapan. Hal ini dikarenakan jumlah dari mereka yang sulit dikoordinir, baik dari minat dan antusias mereka terhadap pemilihan maupun pada tahap pelaksanaan pemilu legislatif dilangsungkan.<sup>42</sup>

Salah satu permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Makassar dimulai dari pendataan. Berbagai institusi melakukan pendataan dengan istilah-istilah disabilitas yang berbeda-beda dan jumlah yang tidak sama. Ada juga dengan metode estimasi. Misalnya dalam istilah ada yang memakai orang dengan gangguan penglihatan, orang dengan kecacatan, orang dengan kesulitan mendengar dan di organisasi disabilitas dikenal tuna daksa, tuna netra, tuna rungu dan tuna grahita. Ketidakakuratan data mengakibatkan program-program pemerintah tidak sesuai dengan kebutuhan dan

---

<sup>42</sup> Leo Agustino, "*Pilkada Dan Dinamika Politik Lokal*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2009), h. 121.

berhasil dengan baik. Sedangkan populasi penyandang disabilitas terdata di Kota Makassar tahun 2008 sebanyak 2.250 orang yang terdiri atas 1.794 orang penyandang disabilitas fisik, 242 orang penyandang disabilitas mental dan 214 orang penyandang disabilitas fisik dan mental (ganda). Terdiri atas : 1.390 laki-laki (62%) dan 860 perempuan (38%).

Berdasarkan Sensus BPS Tahun 2010 jumlah penyandang disabilitas di Kota Makassar jauh lebih besar yaitu sebanyak 93.629 orang dengan istilah berbeda seperti tertera dibawah ini :

No	Jenis Disabilitas Ketergantungan	Tingkat		
		Ringan	Sedang	Parah
1.	Kesulitan Melihat (Disabilitas Netra)	40.855	2.757	43.612
2.	Kesulitan Mendengar (Disabilitas Rungu / Wicara)	11.373	1.778	13.151
3.	Kesulitan Berjalan/Naik Tangga (Disabilitas Daksa)	10.901	2.686	13.587
4.	Kesulitan Mengingat /Berkonsentrasi /Berkomunikasi (Disabilitas Grahita)	9.486	2.422	11.908
5.	Kesulitan Mengurus Diri Sendiri (Disabilitas Ganda)	8.786	2.585	11.371
Jumlah		<b>81.401</b>	<b>12.228</b>	<b>93.629</b>

Sumber: BPS Kota Makassar Tahun 2010



Adapun hambatan yang teridentifikasi atas kaum disabilitas pada saat pemilihan umum adalah jenuh menunggu antrian, tidak peduli akan proses pemilu. Hambatan lainnya adalah keluarga yang malu karena ada anggota keluarga mereka yang punya keterbatasan fisik, sehingga mereka tidak mengijinkannya untuk berpartisipasi dalam pemilu.

Adapun permasalahan-permasalahan terkait kesulitan-kesulitan dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemilih penyandang disabilitas dalam pemilu:

- a. Meskipun KPU bekerja sama dengan 26 LSM, sosialisasi dan simulasi pemilu masih sangat kurang. Pemilih penyandang disabilitas tidak memahami mekanisme dan teknis pengambilan suara. Perubahan dari cara mencoblos ke mencontreng serta jumlah partai, nomor urut dan anggota calon legislatif yang banyak membingungkan para pemilih penyandang disabilitas terutama tuna netra. Sosialisasi terhadap petugas di lapangan juga terbatas. Petugas banyak yang tidak memahami cara menangani pemilih penyandang disabilitas seperti penggunaan alat bantu tuna netra, petunjuk bagi tuna rungu dan tempat bagi pengguna kursi roda.

- b. Jumlah dan posisi pemilih penyandang disabilitas tidak terpetakan sehingga banyak pemilih penyandang disabilitas yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Hal ini disebabkan oleh keengganan petugas pendata untuk menanyakan jenis disabilitas kelompok yang didata dan kecurangan petugas pendata untuk tidak mendaftarkan pemilih penyandang disabilitas.
- c. Banyak TPS yang berlokasi di areal yang berumput tebal, becek, berbatu-batu, berlubang-lubang, berundak-undak, menanjak dan di tempat yang tinggi sehingga sulit dijangkau oleh pemilih pengguna kursi roda.
- d. Alat bantu tuna netra hanya tersedia untuk lembar surat suara DPD sehingga untuk pemilihan anggota legislatif pemilih penyandang tuna netra mesti didampingi petugas atau anggota keluarganya.
- e. Asas luber tidak terjamin karena dalam memberikan suaranya pemilih tuna netra didampingi oleh petugas, bukan orang yang dipilihnya sendiri. Begitu pula dengan pemilih pengguna kursi roda, suaranya diwakilkan karena aksesibilitas ke TPS kurang memadai.
- f. Surat suara berukuran 84 cm x 54 cm sangat menyulitkan pemilih penyandang disabilitas. Meskipun menggunakan alat bantu tuna netra, seorang pemilih

tuna netra membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit untuk memberikan suaranya.

- g. Tidak tersedianya petunjuk dan informasi tentang pemilu yang dikemas khusus dengan menggunakan bahasa isyarat untuk pemilih tuna rungu sehingga sering menimbulkan kesalahan persepsi pada saat pendaftaran peserta pemilu dan mendengar penjelasan petugas tentang pemungutan suara.
- h. Sistem controng dikhawatirkan akan menghapus hak berpolitik pemilih penyandang tuna netra karena tanda controng digambar beragam oleh para tunanetra yang tidak bisa melihat sejak lahir

Negara yang aman dan nyaman adalah harapan semua warganya, baik yang tidak punya keterbatasan fisik maupun punya. Negara harus dapat memberikan akses yang optimal bagi penyandang disabilitas di semua tempat-tempat umum. Akses yang optimal ini termasuk Tempat Pemilihan Suara (TPS) pada saat pemilu, namun kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak TPS yang tidak mudah diakses oleh mereka, sehingga ini juga berdampak pada partisipasi politik mereka pada saat pemilihan umum.

Akan halnya hak untuk dipilih, banyak dokter penguji kesehatan di daerah yang mengidentikkan disabilitas dengan

tidak sehat jasmani dan rohani, sehingga ini menghambat mereka untuk dapat mencalonkan diri dalam pemilihan umum, baik legislative maupun eksekutif.

Secara umum perhatian pemerintah melalui KPU juga organisasi PPDI sudah maksimal, namun terkadang masih menemui hambatan-hambatan baik dalam system pemungutan suara yang kadang berubah, aksesibilitas ke TPS, juga dari diri / keluarga kaum disabilitas sendiri

**BAB V**

# ***RESPON MASYARAKAT TERHADAP PEMENUHAN HAK POLITIK KAUM DIFABEL DI KOTA MAKASSAR***

## **1. Respon Positif Masyarakat**

Politik modern mengajukan gagasannya yang cukup ampuh yakni tutunan moral. Materi perbincangannya adalah, bagaimana manusia wajib memperlakukan manusia, mendahului penetapan yang diambil oleh lembaga manusia, termasuk negara secara potensi cukup kuat untuk melindungi orang dan sekelompok orang lemah dari kesewenangan yang kuat.<sup>43</sup>

Pandangan masyarakat terhadap kaum difabel juga dibedakan menjadi dua model, yaitu individual model dan social model. Individual model menganggap jika kecacatan yang dialami oleh seseorang itu lah yang dianggap sebagai masalahnya. Sedangkan *social model* menganggap jika masalahnya bukan terletak pada kecacatan yang dialami oleh seseorang, tapi bagaimana cara pandang masyarakat yang negatif terhadap kaum difabel ini yang menimbulkan masalah.

---

<sup>43</sup> Jumardi SH., MH., *Refleksi Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Makassar: Alauddin University Press), h. 48.

Keberadaan kaum difabel itu pasti ada dalam sebuah negara. Di Indonesia sendiri memiliki jumlah kaum difabel mencapai 7 juta orang atau sekitar 3% dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 238 juta pada tahun 2011.<sup>44</sup>

Dengan adanya payung hukum, diharapkan akan tercipta sebuah tata kehidupan yang dapat mendorong difabel untuk turut aktif berpartisipasi dan mengembangkan potensi dalam bidang pendidikan, pekerjaan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan bidang lainnya. Selama ini kepedulian masyarakat terhadap kaum difabel sangat kurang. Sementara itu aturan perundang-undangan sudah jelas menyatakan jika difabel mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah.

Dalam pemilu partisipasi menjadi sangat dibutuhkan karena dengan begitu suara publik mampu menentukan wakil-wakilnya yang akan menentukan nasib masyarakat untuk masa depan. Proses berjalannya pesta demokrasi ini haruslah dapat diakses oleh siapapun, dari golongan apapun itu, termasuk mereka yang selama ini terpinggirkan dalam kehidupan masyarakat seperti penyandang difabel.

Adapun respon positif dari kaum difabel adalah:

---

<sup>44</sup> Andi Sulastri, "*Tinjauan Hukum Terhadap Penyediaan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar*", Skripsi" (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2014).

- a. Mereka merasa diperhatikan haknya, baik oleh PPDI maupun oleh penyelenggara pemilu. Di atas semua itu, ada hal yang menurut mereka lebih penting dari sekedar memberikan suara. Mereka berharap agar suara yang mereka berikan dapat berkontribusi positif terhadap hidup dan kehidupan mereka. Kandidat yang terpilih hendaknya memperhatikan kebutuhan-kebutuhan mereka, tidak hanya dalam bidang politik, tetapi juga social dan ekonomi.
- b. Bertambahnya pengetahuan akan hak dan kewajiban politiknya. Kaum difabel sudah memperoleh pemahaman yang cukup bahwa mereka dapat memilih bahkan dipilih dalam pemilihan umum. Meskipun begitu, pada kenyataannya sebuah survey menyatakan bahwa bahwa sebanyak 79,9% responden tidak akan memilih pemimpin dari kaum difabel, karena mereka kurang percaya terhadap kemampuan mereka.

## **2. Respon Negatif Masyarakat**

Perhatian yang serius harus dilakukan terhadap nasib dan masa depan penyandang difabel. Secara esensial, perspektif hak asasi manusia terdapat catatan, bermakna



pemosisian masyarakat terhadap kecatatan sebagai subjek, bukan objek.<sup>45</sup>

Umumnya masyarakat menghindari kaum difabel dari kehidupan mereka. Alasannya sederhana, karena mereka tidak ingin mendapatkan efek negatif dari kemunculan kaum difabel dalam kehidupan mereka seperti sumber aib, dikucilkan dalam pergaulan, dan permasalahan lainnya. Difabel yang biasa kita temui sehari-hari adalah orang yang terlahir cacat tanpa penglihatan yang bagus (tunanetra), pendengaran yang bagus (tunarungu), pembicaraan yang bagus (tunawicara), dan sebagainya. Difabel yang mengarah pada cacat mental juga dapat kita lihat pada seseorang yang memiliki keterbelakangan mental.

Masyarakat menganggap jika keberadaan kaum difabel ini sebagai sesuatu hal yang merepotkan. Ada yang menganggap keberadaan mereka sebagai aib keluarga, biang masalah, hingga kutukan akan sebuah dosa yang pada akhirnya semakin memojokkan difabel dari pergaulan masyarakat.

Stigma buruk dan ketidak berdayaan penyandang difabel masih melekat dalam masyarakat sehingga, enggan

---

<sup>45</sup> Satya Arinanto, “*Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*”, (Jakarta: Rajawali Pers), h. 273.

untuk memilih penyandang difabel sebagai pemimpin mereka. Jika dikaitkan dengan terjadinya perubahan dalam masyarakat dengan keikutsertaannya dalam dunia politik, maka pandangan masyarakat yang tidak akan memilih kaum difabel sebagai pemimpin mereka ini akan berseberangan dengan usaha mewujudkan implementasi penegakan hak-hak penyandang difabel.

Pandangan negatif yang tertuju kepada kaum difabel kebanyakan dari masyarakat awam yang belum mengetahui hak-hak kaum difabel, sehingga produksi wacana sosial terhadap kaum difabel menjadi buruk. Hal ini secara garis besar telah memposisikan kaum difabel di garis berbeda yang menimbulkan stigma yang dapat mempengaruhi aktivitas mereka.

Kaum difabel sudah mempunyai komunitas untuk saling berbagi satu sama lain, hal ini menjadi langkah mereka untuk memajukan kehidupan mereka dalam ruang kehidupan. Namun pendapat yang juga masih di takutkan adalah ketika komunitas kaum difabel ini dapat dengan mudah terpengaruh oleh kelompok tertentu, tidak terpengaruh politik dari golongan tertentu sehingga netralisasi suara politik mereka dapat terpengaruhi, seperti wawancara dengan Abdullah Mansyur instansi KPU yang mengatakan:

*“Yang di takutkan itu ketika komunitas kaum difabel akan mudah terpengaruh jika mereka di dekati oleh orang-orang politik yang bisa saja dengan memberikan mereka bantuan, nanti suara politik mereka akan tidak sesuai dengan hati nuraninya”.*<sup>46</sup>

Dapat dipahami wawancara diatas, adalah kerentanan pengaruh yang dapat hadir dari segala sisi, yang dapat merubah kenetralisasian pilihan kaum difabel sehingga suara politik mereka tidak murni dari hati melainkan dari rasa ketidakenakan ingin membalas bantuan.

Seharusnya komunitas kaum difabel dihindarkan dari segala jenis pendekatan yang mempunyai kepentingan politik yang dapat menjebak mereka dalam dilematis pilihan politik yang ditakutkan dapat memunculkan konflik internal ketika perbedaan pendapat menggeliat dalam tubuh organisasi maupun pribadi mereka.

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan salah satu informan, Abdullah Mansyur pekerjaan: Instansi KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Makassar, pada 10 Oktober 2017.

**BAB VI**

## ***PENUTUP***

Berdasarkan ringkasan dari materi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan antara lainnya;

1. Bentuk perhatian Persatuan Penyandang Difabel Indonesia (PPDI) dalam memberikan perhatian kepada kaum difabel adalah dengan termanifestasikannya konvensi-konvensi yang memberikan perlindungan hukum terhadap hak penyandang difabel yang telah dilakukan melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Peren PPDI mengadakan koordinasi, konsultasi dengan organisasi kecacatan dalam rangka peningkatan mutu dan pelayanan kesejahteraan penyandang cacat, memberikan masukan kepada Pemerintah dalam upaya peningkatan kebijaksanaan dan program dibidang kesejahteraan penyandang cacat, memperjuangkan pemenuhan hak-hak penyandang difabel dapat memperoleh kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Dalam pemilu legislatif PPDI mengkordinir kaum difabel untuk tercapainya pemenuhan hak-hak politik

kaum difabel. PPDI terus memberikan perhatian yang dalam proses pemilu, dari sosialisasi pemilu, cara menggunakan hak memilih, hak dipilih, menjadi pejabat, menjadi pengurus partai. PPDI terus memberikan perhatian yang di butuhkan dalam pemenuhan hak politik kaum difabel.

2. Respon masyarakat terhadap pemenuhan hak politik difabel umumnya menghindari kaum difabel dari kehidupan mereka. Alasannya, karena mereka tidak ingin mendapatkan efek negatif dari kemunculan kaum difabel dalam kehidupan mereka seperti sumber aib, dikucilkan dalam pergaulan, dan permasalahan lainnya. Namun, Peningkatan kesadaran masyarakat dan tanggung jawab negara untuk mengatasi difabel menjadi tugas penting dari komunitas bangsa-bangsa di dunia sehingga setiap orang, terlepas dari jenis dan keparahan kecacatan (impairment) yang dimiliki mampu menikmati hak-hak mereka yang paling hakiki.

## ***DAFTAR PUSTAKA***

- Al-Qur'an Al-Qarim, Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2016.
- Anam, Khoirul. "Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan untuk Mahasiswa, Yogyakarta: Inti Media, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Kebebasan Dalam Islam* (Cet I), Jakarta: Timur Pustaka Al-Kausar, 2005.
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Prima Grafika, 2015.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Kota Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Bramantyo, Hangga Agung "Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2015", Skripsi, Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Fachruddin, Fuad. *Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nadhlatul Ulama*. Pustaka Alvabet, 2006.
- Gatara, A. Asaid, dan Said, Moh. Dzulkikiah Said, *Sosiologi Politik: Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*, edisi 2007.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia, 1990.
- Khaliq, Farid Abdulah. *Fikih Politik Islam*. Jakarta: AMZAH, 2005
- Marzali, Amri, *Antropologi dan Kebijakan Publik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).

- Muhammad bin Isma‘il Abu „Abdillah al-Bukhari al-Ju‘fi, Sahih al-Bukhari, Juz III.
- Muhtaj, Majda El.Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi Sosial, dan Budaya. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- M. Syafi‘ie, “Pemenuhan Hak Aksesibilitas Bagi penyandang Disabilitas”, penelitian pada LSM singap Yogyakarta, Vol. 1 No 2 Juli-Desember 2014.
- Mulada, H, “HAKASASI MANUSIA (Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat), (Bandung : PT Refika Aditama).
- Nursyamsi, Fajridan Estu Dyah Arifianti, “Aksesibilitas Pemilihan Kepala Daerah Serentak Bagi Warga Negara Disabilitas”, Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Vol. 1, No 1, Januari 2016.
- Purwono (2009) Buku Materi Pokok: Dasar-dasar Dokumentasi. Jakarta: Universitas Terbuka. Modul 1.
- Ramli, Muhammad, “Kearifan Lokal Dalam Implementasi Kebijakan Publik”, (Makassar: Alauddin University Press).
- Rita, Maria Desti, “Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilihan Umum Kepala Daerah Kepada penyandang Disabilitas Di Kota Bandar Lampung”, Skripsi, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Rosady Ruslan, Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Rumateray, Yune Angel Aggelia. “Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Atas Pendidikan Negeri Di



- Universitas Islam Negeri SunanKalijaga Yogyakarta”,  
Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2016
- Soedirman, Moch. Basori, HAM dan Pluralisme Agama  
Surabaya: Pusat Kajian Strategi Dan Kebijakan, 1997.
- S. Nasution, Metode Research (PenelitianIlmiah), Jakarta:  
BumiAksara, 2006.
- Schroder, Peter. StrategiPolitik, Jakarta: Friedrich  
NaumanStiftung, 2004.